ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KUBA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional

OLEH:

TALITHA AULIA AHDANA

NIM. I02216028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FEBRUARI 2021

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Talitha Aulia Ahdana
NIM	: I02216028
Program Studi	: Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: **Analisis Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata pada kemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil plagiasi.

Surabaya, 8 Februari 2021

Menyatakan

Talitha Aulia Ahdana

NIM. I02216028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama	: Talitha Aulia Ahdana
NIM	: I02216028
Program Studi	: Hubungan Internasional

yang berjudul: "**Analisis Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump**", saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 8 Februari 2021
Pembimbing

Mohammad Fathoni Hakim, M. Si
NIP: 198401052011011008

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Talitha Aulia Ahdana: **"Analisis Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kuba Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Februari 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Penguji II

M. Qobidl 'Ainul Arif, S.IP, MA
NIP. 198408232015031002

Penguji III

Ach. Ismail, M.S.I
NIP. 198212302011011007

Penguji IV

Ridha Amatryah, S.IP, MBA
NUP. 201409001

Surabaya, 9 April 2021

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Talitha Aulia Ahdana
NIM : I02216028
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : talithaahdana99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
☐ ✓Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kuba pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Desember 2021

Penulis

(Talitha Aulia A)

ABSTRACT

Talitha Aulia Ahdana, *2021, Analysis of United States Foreign Policy to Cuba during the Administration of President Donald Trump, (Thesis of International Relations Study Program at Faculty of Social and Political Science Sunan Ampel State Islamic University in Surabaya)*

Keywords: United States, Foreign Policy, Cuba

The foreign policy that imposed by the United States has undergone changes since the cold war era until the era of President Donald Trump (2017-2019). In the era of President Donald Trump, the National Security Presidential Memorandum-5 (NSPM-5) was formed, which in the memorandum contains several policies that not only discuss about tourism policy, but also discuss economic and security issues. In this research, the author used a qualitative approach with an explanatory type. Referring to the theory put forward by Marijke Breuning to analyze the research, there are three stages in analyzing foreign policy, namely decision, behavior, and outcome. The results of the research analysis indicate that the reason or factor for the formation of the National Security Presidential Memorandum-5 are due to the historical background between the United States and Cuba which was not harmonious since the Cold War until the leadership of President Donald Trump, the leadership style and personality of President Donald Trump and his cabinet also influences the policies that are decided, and with the establishment of the National Security Presidential Memorandum-5, it is hoped that it will protect the security of the United States of America

.

ABSTRAK

Talitha Aulia Ahdana, 2021, *Analisis Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump*, (Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Kata Kunci: ***Amerika Serikat, Politik Luar Negeri, Kuba***

Politik luar negeri yang diberlakukan oleh Amerika Serikat telah mengalami perubahan semenjak era perang dingin hingga era Presiden Donald Trump (2017-2019). Pada era Presiden Donald Trump terbentuklah *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5), yang mana dalam memorandum tersebut berisi mengenai beberapa kebijakan yang tidak hanya membahas mengenai kebijakan wisata, namun juga membahas masalah ekonomi serta keamanan. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksplanatif. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Marijke Breuning untuk menganalisa penelitian tersebut, terdapat tiga tahapan dalam menganalisis politik luar negeri, yaitu *decision*, *behavior*, dan *outcome*. Hasil dari analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan atau faktor terbentuknya *National Security Presidential Memorandum-5* karena adanya latar belakang sejarah antara Amerika Serikat dengan Kuba yang tidak harmonis sejak Perang Dingin hingga masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, gaya kepemimpinan serta personalitas Presiden Donald Trump beserta para kabinet pemerintahannya juga mempengaruhi kebijakan yang diputuskan, serta dengan dibentuknya *National Security Presidential Memorandum-5* diharapkan dapat melindungi keamanan negara Amerika Serikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iii**
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR BAGAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kajian Literatur 11
F. Argumentasi Utama 23
G. Sistematika Penyajian Skipsi 24
BAB II KERANGKA TEORITIK **27**
A. Teori Politik Luar Negeri 27
B. Kerangka Konseptual *Rollback* 35
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Batasan Masalah Penelitian 37
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tahapan Penelitian 40
E. Subjek dan tingkat analisa data 41
F. Teknik Pengumpulan Data 42
G. Teknik Analisa Data 43
BAB IV PEMBAHASAN 49
A. Dinamika Hubungan AS-Kuba 49
B. Analisis *National Security Presidential Memorandum-5* dalam Politik Luar Negeri AS 70
BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 67
Gambar 4.2 68
Gambar 4.4 74
Gambar 4.5 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 7
Tabel 2.1 32
Tabel 4.1 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara pasti mempunyai hubungan kerjasama antar negara lain. Hubungan tersebut secara politik atau pemerintahan disebut sebagai politik luar negeri atau kebijakan luar negeri. Dalam hal tersebut tidak sembarang kebijakan dibuat hanya untuk seolah-olah menerima saran dan kritik dari masyarakat, namun pembuat kebijakan juga harus melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan dibuat. Suatu politik luar negeri yang berhasil dapat dikatakan bahwa kebijakan yang diterapkan membawa dampak positif bagi negaranya, serta adanya hubungan timbal balik yang positif diantara negara yang bekerjasama. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti politik luar negeri yang diterapkan Amerika Serikat kepada Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Kuba merupakan salah satu Negara di Benua Amerika tepatnya terletak di daerah Pulau Karibia yang kini memiliki ideologi sosialis-komunis di lingkungan yang liberal-demokratis. Berada di benua Amerika yang mana AS mempunyai peran penting pada kekuasaan di benua tersebut membuat Kuba mengalami banyak tekanan serta keterlambatan dalam memajukan negaranya. Keterlambatan tersebut dikarenakan hubungan kedua negara yang tidak harmonis. Hubungan yang tidak harmonis tersebut telah dimulai sejak tahun 1959 dimana pada saat itu Fidel Castro beserta Che Guevara menggulingkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rezim Presiden Fulgencio Bautista untuk mendirikan sebuah negara yang berhaluan sosialis-komunis.[2] Terjadinya kegagalan AS dalam melakukan invasi Teluk Babi, serta adanya perjanjian dagang antara Kuba dengan Uni Soviet kala itu juga menjadi beberapa faktor hubungan kedua negara tersebut renggang, sehingga puncak dari ketengangan yang sengit tersebut membuat AS untuk memutuskan hubungan diplomatik serta mulai melakukan embargo ekonomi dengan Kuba pada tahun 1961.[3]

Setelah lima dekade lamanya hubungan kedua negara tersebut tidak harmonis, pada bulan April tahun 2009 menjadi langkah bersejarah bagi AS yang saat itu dipimpin oleh Presiden Barack Hussein Obama untuk berinsiatif membuka kembali pintu untuk menjalin hubungan dengan Kuba.[4] Proses yang dilalui kedua negara tersebut tidaklah mudah, karena masing-masing pemimpin juga telah 50 tahun lamanya tidak pernah bertemu kembali. Dengan adanya bantuan fasilitator atau penengah oleh Vatikan dan Canada, dipertemukanlah Raul Castro dan Barack Obama untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai normalisasi hubungan diplomatik serta menjadi babak awal bagi kedua negara tersebut.

Pembicaraan antara pemimpin negara tersebut menuju kepada penghapusan embargo ekonomi serta terbukanya kembali kantor kedutaan AS

---

[2] Steve Jones, "US and Cuba Have History of Complex Relations", diakses pada 12 Agustus 2020, https://www.thoughtco.com/us and-cuba-have-history-of-complex-relations-3310195
[3] History Editors, "United States severs diplomatic relations with Cuba", diakes pada 12 Agustus 2020, https://www.history.com/this-day-in-history/united-states-severs-diplomatic-relations-with-cuba
[4] Theodore J Piccone, etc, *Bridging Cuba's Communication Divide: How U.S. Policy Can Help*, (Brookings: Research Report, 2010) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kuba (Kota Havana). Seperti yang dikatakan oleh Barack Obama melalui *White House*:

> "*Promote contacts between Cuban-Americans and their relatives in Cuba"* dan "*increase the flow of information on the Cuban people"* [5]

bahwa langkah awal yang akan memulai proses normalisasi tersebut adalah dengan menghubungkan kembali kontak antara warga Kuba-AS dengan kerabat atau saudara yang ada di Kuba, serta meningkatkan arus informasi yang dapat diterima oleh orang-orang Kuba. Pada masa pemerintahan Barack Obama, ia juga akan membuat terbukanya kembali hubungan dengan Kuba secara politik, serta mendorong Kuba untuk menunjukkan image yang baik untuk mencapai suatu keberhasilan yang tidak akan gagal lagi baik dalam diplomatik maupun komersial. Kebijakan AS dalam normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba pada era Obama dapat terlihat pada bidang pariwisata, teknologi dan komunikasi.

Pemandangan kota Havana yang eksostis serta terjangkaunya harga untuk berwisata ke Kuba membuat banyak turis asing ingin bertandang ke negara tersebut, khususnya turis yang berasal dari AS. Pada bidang pariwisata tercatat sebelum tahun 2014, mayoritas orang AS berharap untuk bepergian ke Kuba. Namun, dengan adanya larangan untuk berwisata atau berkunjung ke Kuba membuat warga AS resah, dikarenakan adanya 12 persyaratan khusus yang harus dilalui. Persayaratan-persayaratan tersebut berada dibawah hukum AS, yang diatur oleh The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign

[5] Ibid., *Bridging Cuba's Communication Divide: How U.S Policy can Help,* 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Assets Control (OFAC). Menurut OFAC hanya orang-orang yang mempunyai lisensi atau tujuan tertentu untuk kepentingan Negara, maka akan diperbolehkan berkunjung ke Kuba.[6]

Pada masa pemerintahan presiden Obama, mereka menghapus syarat-syarat untuk mengajukan lisensi khusus agar bisa bepergian ke Kuba. Warga AS dapat bepergian ke Kuba jikalau hanya terdapat 1 syarat yang mereka punya. Setelah 55 tahun lamanya, 31 Agustus 2016, pesawat komersial Amerika Serikat Jetblue Flight 387 mendarat di Kuba.[7]Selain diperbolehkannya pesawat komersial, kapal pesiar juga diperbolehkan untuk bersandar di Kuba. Salah satu kebijakan bersejarah yang dilakukan Presiden Obama dalam hal pariwisata adalah mensahkan atau menyetujui perjalanan *The Nation people-to-people* dan perjalanan tur pendidikan.

Selain adanya batasan terhadap wisata ke Kuba, AS juga mengeluarkan kebijakan pada *information and communication technologies* (ICT). Sejak tahun 2008, layanan internet dan telepon seluler telah berkembang pesat di Kuba sejak diperkenalkannya merk komunikasi seluler yaitu *ETECSA Cubacel* yang memungkinkan akses internet melalui hotspot wifi.[8] Namun, pada tahun 2018 dengan berkembangnya teknologi saat ini jaringan seluler yang masih digunakan oleh masyarakat Kuba adalah 2G dan 3G dan tidak semua orang

---

[6] Maria Dolores Espino, "International Tourism in Cuba: An Update," *ASCE: Cuba in Transition*, 2008, 132.
[7] Peter Kornbluh, "Why Is Trump Assaulting Americans' Freedom to Travel to Cuba?" diakses pada 12 Agustus 2020, https://www.thenation.com/article/archive/cuba-trump-travel-restrictions/
[8] Ding, "Mobile data Coming to Cuban Phone Users in 2018", diakses pada 12 Agustus 2020, https://www.ding.com/countries/carribean/cuba/recharge-cubacel/blog/mobile-data-coming-to-cuban-phone-users-in-2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memakai fasilitas tersebut. [9] Akes internet hanya disediakan di wilayah pendidikan, kantor pemerintahan, warga asing serta turis. Jalan satu-satunya pada saat itu bagi rakyat Kuba untuk menikmati internet adalah mengakses *blackmarket* dengan menggunakan akun pengguna yang dijual oleh pemilik akun (anggota universitas) atau menggunakan komputer yang disediakan oleh hotel untuk para turis. Terbatasnya infrastruktur serta banyaknya aturan dari pemerintah Kuba sendiri membuat warganya kesusahan dalam mengakses informasi.

Namun, semua kebijakan yang longgar dan bersejarah tersebut tidak berlangsung lama. Setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Barack Obama pada tanggal 20 Januari 2017, saat itu juga Donald Trump akan mengucapkan sumpah jabatannya sebagai presiden ke-45 untuk Amerika Serikat. [10] Sebelumnya pada masa kampanye, Donald Trump telah membanting langkah yang telah dilakukan oleh Presiden Barack Obama kala normalisasi dengan Kuba.

> *"one-sided deal for Cuba" that "benefits only the Castro regime," and pledged to undo the measures "unless the Castro regime meets our demands.*"[11]

Dalam pidato kampanye tersebut yang disampaikan oleh kandidat Donald Trump bahwa langkah tersebut merupakan kesepakatan satu sisi untuk

---

[9] "Cuba Internet Task Force: Final Report*"*, Bureau of Western Hemisphere Affairs (U.S. Department of State: Report, 2019) diakes pada 12 Agustus 2020, https://www.state.gov/cuba-internet-task-force-final-report/

[10] Silviana Dharma, "Susunan Acara Pelantikan Donald Trump dan Mike Pence", diakses pada 12 Agustus 2020, https://new.okezone.com/read/2017/01/16/18/1592581 /susunan-acara-pelantikan-donald-trump-dan-mike-pence

[11] Jen Kirby, "Trump tightens Cuba travel rules", diakses pada 12 Agustus 2020, https://www.vox.com/2019/6/4/18652342/cuba-trump-restrictions-travel-cruises

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuba dan hanya menguntungkan rezim Castro, dan ia juga berjanji akan membatalkan langkah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya kecuali jika rezim Castro memenuhi tuntutan yang akan diberikan oleh AS terhadap Kuba.

Dengan latar belakang seorang pebisnis, dia maju sebagai kandidat presiden dari Partai Republik. Karena masih adanya rasa perbedaan dalam memandang ideologi, membuat Donald Trump bersikukuh untuk merubah kebijakan atau peraturan demi keuntungan serta keamanan negaranya. Juni 2017 ia mengumumkan untuk merombak beberapa kebijakan yang dilakukan pada era Obama untuk hubungan AS dengan Kuba yang tercantum dalam *National Security Presidential Memorandum-5 (NSPM-5).*[12] Pada NSPM-5 terdapat beberapa kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden Donald Trump. Terdapat 2 kebijakan yang paling signifikan yang ia rombak, yaitu melarang perusahaan AS untuk melakukan kerjasama bisnis yang dikendalikan oleh militer Kuba, dan memberikan batasan baru untuk perjalanan wisata ke Kuba.[13] Hampir semua kebijakan pada era Presiden Barack Obama ia ubah, embargo ekonomi akan terus dilanjutkan dan semakin memperketat batasan antara Kuba dan AS.

[12] HP, "Trump's Cuba Policy", Albright Stonebridge Group (2017): 1, https://www.albrightstonebridge.com/files/ASG%20US%20-%20Trump%27s%20Cuba%20Policy%20-%20June%202017_0.pdf
[13] Ibid., HP, "Trump's Cuba Policy", 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TOTAL KEDATANGAN TURIS TAHUN 2019

Negara	2019	%	2018	%	% Perubahan
AS	498,067	11.6%	637,907	13.5%	-21.9%
Kanada	1,119,853	26.2%	1,109,339	23.5%	0.9%
Jerman	174,822	4.1%	208,287	4.4%	-16.1%
Prancis	168,998	4.0%	197,122	4.2%	-14.3%
Inggris	123,535	2.9%	189,813	4.0%	-34.9%
Italia	133,227	3.1%	177,652	3.8%	-25.0%
Rusia	176,964	4.1%	136,613	2.9%	29.5%
Meksiko	166,716	3.9%	171,555	3.6%	-2.8%
Spanyol	145,701	3.4%	167,370	3.6%	-12.9%
Warga Kuba yang tinggal di luar negeri	623,972	14.6%	600,306	12.7%	3.9%
Lain-lain	943,703	22.1%	1,115,946	23.7%	-15.4%
Total	**4,275,558**	**100.0%**	**4,711,910**	**100.0%**	**-9.3%**

Tabel 1.1 (Sumber: National Office of Statistics and Infromation (ONEI))

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berjalannya masa pemerintahan Presiden Donald Trump yang menerapkan dan meningkatkan kembali sanksinya, telah berdampak pada bisnis swasta di Kuba khususnya sektor pariwisata. Secara resmi pemerintah Kuba melaporkan bahwa pada tahun 2019 hampir 4,3 juta wisatawan yang berkunjung ke Kuba, jumlah tersebut menurun hingga 9,3% dibandingkan pada tahun 2018 wisatawan yang berkunjung mencapai 4,7 juta.[14]

Selain menetapkan aturan baru terhadap pembatasan berwisata ke Kuba, pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump juga memberlakukan aturan terhadap kasus HAM di Kuba, penghentian ekspor minyak Venezuela ke Kuba, tuntutan hukum untuk properti yang disita, sanksi perdagangan dan keuangan (mengakhiri transaksi *u-turn*), pembatasan dalam membuat visa, aksi kongres 116th -dalam pendanaan bantuan demokrasi dari AS untuk Kuba, serta bantuan dalam hal *broadcasting*.[15]

Penelitian ini menarik untuk dibahas karena terdapat kebijakan AS yang baru dan telah dicantumkan oleh Presiden Donald Trump pada NSPM-5. Dengan adanya kebijakan yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Barack Obama menjadi langkah bersejarah bagi AS karena berupaya untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba, dan mendapat sambutan serta dukungan hangat baik dari rakyat Kuba atau AS.

Namun, pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump beberapa kebijakan telah diubah. Kebijakan yang ia ubah adalah memunculkan kembali

---

[14] Mark P Sullivan, "Cuba: U.S. Policy Overview", Congressional Research Service, 2020, diakses pada 12 Agustus 2020, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10045
[15] Ibid., "Cuba: U.S. Policy Overview", diakses pada 12 Agustus 2020 https://crsreport.congress.gov./product/pdf/IF/IF10045

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batasan-batasan untuk bepergian ke Kuba, batasan dalam penggunaan alat telekomunikasi serta terus berlanjutnya embargo atau sanksi ekonomi. Dengan terus berlanjutnya embargo ekonomi, membuat para pebisnis atau *stakeholder* AS berkecil hati untuk melakukan kerjasama bisnis dengan Kuba. Hal itu membuat Kuba semakin berada di bawah tingkat pendapatan negaranya karena turunnya jumlah wisatawan jika dibandingkan dengan Negara-negara yang ada di kepulauan Karibia. Merujuk pada beberapa faktor diatas, penelitian ini berfokus pada alasan terjadinya atau terbentuknya kebijakan pada NSPM-5 dalam politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: Mengapa Pemerintahan Presiden Donald Trump Mengeluarkan Kebijakan Luar Negeri *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab dan akibat dari munculnya *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5) pada politik luar negeri AS terhadap Kuba yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademik maupun praktis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional di era globalisasi saat ini, khususnya dalam konsentrasi bidang politik luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber rujukan atau refrensi kedepannya dalam hal penelitian sejenis. Penelitian ini juga menjadi sumber wawasan tambahan bagi peneliti dalam memahami dan mengembangkan Ilmu Hubungan Internasional kontemporer, terutama dalam mengkaji masalah politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi salah satu sumber masukan bagi beberapa pihak terkait dan masyarakat:

a. Menjadi salah satu sumber rujukan bagi pihak swasta ataupun kantor pemerintahan (khususnya dalam bidang internasional atau luar negeri), serta pembuat kebijakan untuk melihat eksistensi politik luar negeri AS terhadap Kuba di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

b. Sebagai salah satu tambahan pengetahuan wawasan bagi masyarakat luas agar lebih mengetahui tentang politik luar negeri, sehingga kedepannya diharapkan agar bisa membuat kebijakan yang menguntungkan semua pihak dan tidak ada ketimpangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Literatur

Penelitian mengenai studi analisis politik luar negeri AS terhadap Kuba bertujuan untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh AS, serta alasan atau faktor-faktor diputuskan dan dibentuknya NSPM-5 pada politik luar negeri AS terhadap Kuba di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebagai pembanding dan pelengkap, peneliti menambahkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesinambungan dengan topik penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi kajian literatur dan kajian kepustakaan peneliti:

1. **Skripsi yang berjudul "Analisis Pemblokadean Kembali Amerika Serikat Terhadap Kuba tahun 2017"[16] diteliti oleh Wirda Nurjannah, Mahasiswa Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah**. Dalam skripsi tersebut peneliti menganalisa pemblokadean kembali yang dilakukan oleh Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump terhadap Kuba pada tahun 2017. Peristiwa tersebut membuat hubungan kedua negara tersebut tidak stabil lagi. Dalam kebijakan yang baru tersebut tidak hanya melibatkan pembuat kebijakan, namun juga beberapa *influencer* serta kepentingan dibalik kebijakan pemblokadean tersebut. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif dan eksploratif analitis. Teknik pengumpulan data yang

[16] Wirda Nurjannah, "Analisis Pemblokadean Kembali Amerika Serikat Terhadap Kuba tahun 2017." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan yaitu melalui studi pustaka dengan mencari data melalui buku, artikel, jurnal, laporan resmi, serta berita. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan teori pengambilan kebijakan luar negeri serta konsep kepentingan nasional. Pemblokadean yang dilakukan kembali oleh Amerika Serikat dikarenakan adanya beberapa kepentingan negaranya yaitu kepentingan ekonomi, ideologi, dan tatanan dunia. Dalam penelitian yang diteliti oleh Wirda Nurjannah memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu saling membahas alasan Amerika Serikat memblokade kembali Kuba pada tahun 2017. Namun ada juga perbedaaan dari kedua penelitian, yaitu perbedaan konsep atau teori dalam mengambil kebijakan politik luar negerinya serta batasan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian yang dibahas oleh Wirda Nurjannah menggunakan analisis kebijakan luar negeri AS terhadap Kuba menurut Andy Singer. Sedangkan penelitian analisis politik luar negeri AS terhadap Kuba yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan analisis politik luar negeri menurut Marijke Breuning.

2. **Skripsi yang berjudul "Kerjasama Bilateral Kuba-AS Pasca Normalisasi Hubungan Kedua Negara Periode 2014-2017"[17] diteliti oleh Bimo Arief Januarko, Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.** Dalam penelitian tersebut peneliti

[17] Bimo Arief Januarko, "Kerjasama Bilateral Kuba-AS Pasca Normalisasi Hubungan Kedua Negara Priode 2014-2017." (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" , 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas dinamika hubungan bilateral antara Kuba dan AS pasca normalisasi. Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori Kerjasama Bilateral, Konsep Kepentingan Nasional, dan Konsep Normalisasi Hubungan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif yang berfkokus pada penggalian informasi dan data mulai dari proses normalisasi hingga tercapai suatu hubungan bilateral antara AS dan Kuba pada tahun 2014-2017. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pasca normalisasi yang terjadi pada tahun 2014-2017 menghasilkan kerjasama kembali antara AS dan Kuba, serta meredakan ketegangan antara kedua negara tersebut agar dapat mencapai kepentingan negara masing-masing. Dari kedua penelitian tersebut terdapat kesamaannya yaitu saling membahas hubungan kedua negara tersebut pasca normalisasi. Namun terdapat juga perbedaan diantara kedua penelitian yaitu perbedaan dalam politik luar negeri yang diatur pasca normalisasi. Jika dalam peneliti yang dibahas oleh Bimo Arief Januarko, ia menjelaskan aturan-aturan pasca normalisasi pada masa kepemimpinan Presiden Barack Hussein Obama. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti fokus terhadap aturan-aturan AS untuk Kuba di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

3. **Jurnal yang berjudul "Kerjasama Anti-Perdagangan Narkoba Amerika Serikat dan Kuba Sebagai Isu Keamanan Nasional pada Era**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan Presiden Donald J. Trump"[18] karya Ranisa Esmeralda Taufik, mahasiswi Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Pada penelitian tersebut peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengapa AS melaksanakan kerjasama anti-narkoba dengan Kuba. Peneliti menggunakan konsep keamanan non-tradisional dengan menitikberatkan pada pendekatan transnasional sebagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah isu keamanan non-tradisional. Hal tersebut dilakukan peneliti untuk menjelaskan penyebab dibalik kebijakan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang lebih terfokus pada upaya-upaya domestik dan perannya yang semakin turun dalam memerangi narkoba, sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan dari kerjasamanya dengan Kuba. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya penurunan dari pemerintah AS untuk melawan narkoba. Tampaknya AS yang berada di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump enggan untuk mengeluarkan biaya besar dalam upaya internasionalnya dan lebih fokus pada lingkup domestik yang sangat terbantu dengan bantuan informasi dari Pemerintah Kuba terkait informasi masuknya narkoba ke AS melalui jalur Karibia. Terdapat kesamaan dalam kedua penelitian tersebut, yaitu sama-sama membahas kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump terhadap Kuba. Namun, terdapat

[18] Ranis Esmeralda Taufik, "Kerjasama Anti-Perdagangan Narkoba Amerika Serikat dan Kuba Sebagai Isu Keamanan Nasional Pada Era Pemerintahan Presiden Donald J. Trump." *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 4, (2019): 718-726

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula perbedaan diantara kedua penelitian tersebut, yaitu penelitian yang akan dibahas oleh peneliti menggunakan kerangka teori analisis politik luar negeri menurut Marijke Breuning, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas meggunakan konsep keamanan non-tradisonal dengan fokus pendekatan transnasional.

4. **Skripsi yang berjudul "Implementasi Normalisasi Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba Tahun 2014-2017"[19] diteliti oleh Zarah Zavira Umar Sakka, mahasiswi Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.** Pada penelitian tersebut peneliti membahas mengenai proses normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Kuba pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama pada tahun 2014-2017. Dalam konteks makna normalisasi dalam hubungan kedua negara tersebut meliputi tiga hal utama, yaitu pembangunan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara, penghapusan Kuba dari daftar negara sponsor teroris, serta meningkatkan perjalanan, perdagangan, dan arus informasi antar kedua negara. Peneliti kemudian melihat bagaimana implementasi normalisasi hubungan hubungan kedua negara tersebut dengan menggunakan konsep *Stag Hunt*. Konsep tersebut digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana implementasi normalisasi yang sesuai dengan sikap yang dijalankan oleh tiap-tiap negara. Kemudian dalam melakukan

[19] Zarah Zavira Umar S," Implementasi Normalisasi Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba Tahun 2014-2017." (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, serta pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti melalui metode *library research* atau metode studi pustaka. Pada kedua penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti juga akan membahas proses normalisasi hubungan diplomatik antara AS dengan Kuba di bawah kebijakan Presiden Barack Obama hingga tahun 2017. Namun, terdapat juga perbedaan antara kedua penelitian tersebut, yaitu penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti lebih terfokus pada transisi atau pergantian rezim yang terjadi pada era Presiden Barack Obama dengan Presiden Donald Trump, yang mana peneliti juga akan lebih terfokus pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Donald Trump untuk Kuba.

5. **Jurnal yang berjudul "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kuba Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump 2017-2019"[20] karya Nur Salamah, mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau**. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai perubahan kebijakan luar negeri AS dari masa Presiden Barack Obama ke Presiden Donald Trump. Perspektif yang digunakan oleh peneliti menggunakan perspektif behavioralis, yang mana memiliki asusmi bahwa perilaku manusia yang akan menyusun suatu institusi atau lembaga yang

[20] Nur Salamah, "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kuba Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump 2017-2019"Jurnal, JOM FISIP Vol.7: Edisi I Januari-Juni (2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pembuat yang tunduk dan pelanggar hukum. Peneliti juga menggunakan konsep kepentingan nasional dari sudut behavioral. Kepentingan nasional dalam hal ini akan dilihat berdasarkan kepentingan kelompok pembuat kebijakan. Sedangakn teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori kebijakan luar negeri menurut Rosenau. Menurut Rosenau terdapat beberapa variable yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan luar negeri yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu (1) idiosinkretik, (2) kelompok kepentingan, (3) birokrasi, (4) nasional, serta (5) sistemik. Pada kedua penelitian tersebut terdapat kesamaan, yaitu saling membahas mengenai perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Namun, terdapat juga perbedaan antara kedua penelitian diatas, yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada kebijakan yang tercantum pada *National Security Presidential Memorandum-5* yang dicetuskan oleh Presiden Donald Trump, serta teori yang akan dipakai oleh peneliti yaitu teori analisis politik luar negeri menurut Marijke Breuning.

6. **Jurnal yang berjudul "Analisis Kebijakan Travel Ban Oleh Presiden Donald Trump"[21] diteliti oleh Muhammad Arraf Rezkia Rachman, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran**. Pada penelitian tersebut peneliti membahas mengenai kebijakan *Travel Ban* yang

[21] Muhammad Arraf Rezkia R, "Analisis Kbeijakan Travel Bana oleh Presiden Donald Trump" Jurnal, Universitas Padjajaran, Vol.04, No.02 (2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Kebijakan tersebut diputuskan oleh Presiden Donald Trump guna melindungi keamanan warga AS serta negaranya dari aksi terorisme. Namun, kebijakan itu menimbulkan banyak kekacuan serta kemarahan di seluruh penjuru dunia, karena kebijakan tersebut telah melanggar prinsip moral dan melanggar hukum yang telah ada sebelumya. Pada kedua penelitian diatas terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai kebijakan Presiden Donald Trump dalam membatasi perjalanan. Namun, terdapat perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti melakukan analisis politik luar negeri menurut aturan yang terdapat pada NSPM-5 yang tidak hanya terfokus pada *travel ban*, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas yaitu hanya menganalisis sebab dan akibat dari adanya kebijakan *travel ban*.

7. **Jurnal yang berjudul "*A Qualitative Content Analysis of US Foreign Policy towards Cuba during Barack Obama's Administration: Hegemony or Leadership*?"** [22] **yang diteliti oleh Mohammad Ali Mousavi yang merupakan seorang Profesor Departemen Studi Amerika serta Elaleh Nourigholamizadeh yang merupakan seorang calon Doktor filsafat Studi Amerika Utara, Universitas Tehran, Iran**. Pada penelitian tersebut membahas mengenai hubungan antara AS dengan Kuba pada masa sebelum kepemimpinan Presiden Barack Obama serta

[22] Mohammad Ali Mousavi, Elaleh Nourigholamizadeh, "A Qualitative Content Analysis of US Foreign Policy towards Cuba during Barack Obama's Administration: Hegemony or Leadership?" *Journal of World Sociopolitical Studies*, Department of American Studies, University of Tehran, Vol.2 No.3 (2018): 445-481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masa jabatan Presiden Barack Obama. Tidak harmonisnya kedua negara tersebut berakar dari intervensi AS dalam proses kemerdekaan Kuba dari Spanyol pada tahun 1890an. Kejadian tersebut yang menyebabkan awal dari lima puluh lima tahun permusuhan antara AS dengan Kuba. Selama Perang Dingin, persaingan antara Uni Soviet dengan AS membuat beberapa kebijakan AS (embargo ekonomi, invasi Teluk Babi, serta krisis rudal Kuba) diberlakukan untuk menggulingkan peemerintahan revolusioner Kuba. Namun, pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama serta Raul castro, mereka berhasil mengejutkan dunia dengan mengumumkan akan mengembalikan hubungan diplomatik serta menenangkan hubungan bilateral pada tahun 2014. Pada analisis konten kualitatif dalam kebijakan Antar-Amerika menunjukkan bahwa hegemoni AS di Amerika Latin khususnya Kuba sangat berakar pada dekade awal pembentukan AS. Adanya embargo ekonomi serta kehadiran militer AS di pulau tersebut menjukkan bahwa kebijakan Presiden Barack Obama tidak menyediakan ruang untuk menyelesaikan masalah dengan Kuba. Pada kedua penelitian tersebut terdapat kesamaan, yaitu saling membahas mengenai dinamika hubungan serta kebijakan yang ditetapkan oleh AS untuk Kuba mulai dari era Perang Dingin hingga era Presiden Barack Obama. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu peneliti tidak hanya akan berhenti menganalisis pada era Presiden Barack Obama, tetapi penulis juga akan menganalisis kebijakan luar negeri atau politik luar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri AS pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump yang terdapat pada NSPM-5.

8. **Jurnal yang berjudul "The US-Cuba Policy Shift as Viewed by *The New York Times*: A Critical Analysis from the Island"[23] diteliti oleh Yoan Karell Acosta Gonzáles, Universitas Havana, Kuba.** Pada penelitian tersebut merupakan hasil dari *critical discourse analysis* (CDA) pada artikel yang diterbitkan oleh *The New York Times* tentang Kuba mulai dari periode 17 Desember 2014-28 Desember 2015. Peneliti mengambil periode tersebut dikarenakan periode tersebut merupakan tahun pertama awal kebijakan Amerika Serikat-Kuba yang baru. Peneliti berupaya dalam menganalisis bubungan AS-Kuba melalui analisis ideologis dan cara AS dalam menghadapi masalah-masalah kontroversial yang dibahas oleh surat kabar. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa alasan AS mengubah kebijakan luar negerinya karena berkenaan dengan ekonomi Kuba yang telah gagal akibat kesalahan pemerintah Kuba dalam ideologinya. Adanya perubahan politik luar negeri AS terhadap Kuba yang baru tersebut sebagai taktik untuk menginduksi perubahan politik yang tidak dapat dipaksakan melalui kebijakan yang sangat agresif yang telah diberlakukan lebih dari setengah abad. Pada kedua penelitian tersebut terdapat kesamaan, yaitu saling membahas mengenai hubungan antara AS-Kuba dengan kebijakan barunya. Namun, terdapat juga perbedaan antara kedua penelitian tersebut,

[23] Yoan Karell Acosta G, "The US-Cuba Policy Shift as Viewed *by The New York Times*: A Critical Analysis from the Island.", diakses pada 11 Maret 2021, *International Journal of Cuban Studies*, Vol.9, No.2 (2017) hal.180-195, https://www.jstor.org/stable/10.13169/intejcubastud.9.2.0180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu periode atau batasan masalah yang dibahas. Penelitian yang dibahas oleh Yoan Karell membahas hubungan AS dengan Kuba pada periode tahun 2014-2015, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti membahas pada periode tahun 2017-2019.

9. **Jurnal yang berjudul "The Role of Ideology in the Moulding of US Foreign Policy Towards Cuba"[24] diteliti oleh Margaret E. Crahan, yang merupakan Senior Sarjana Penelitian dan Direktur Program Kuba di Institut Studi Amerika Latin, Universitas Columbia, AS.** Pada penelitian tersebut peneliti menganalisis kepribadian serta naluri Presiden Donald Trump dalam menentukan kebijakan luar negeri AS khususnya terhadap Kuba. Peneliti juga beranggapan bahwa karakter Donald Trump sebagai Presiden dapat menentukan setiap keputusan, mengingat ia sendiri memiliki keyakinan bahwa dia sendiri dapat memperbaiki sesuatu yang salah dengan pemerintahan AS. Pengejaran normalisasi hubungan antara AS dengan Kuba tidaklah sesuai dengan Presiden Donald Trump, dikarenakan rezim komunis dapat menimbulkan ancaman terhadap budaya serta nilai-nilai AS yang harus dipertahankan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi peradaban Barat. Presiden Donald Trump juga telah berulang kali menegaskan bahwa keputusan peemrintahan Barack Obama untuk menormalisasi hubungan dengan Kuba merupakan suatu keputusan yang buruk. Pada kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan, yaitu

[24] Margaret E. Crahan, "The Role of Ideology in the Moulding of US Foreign Policy Towards Cuba.", diakses pada 11 Maret 2021, *International Journal of Cuban Studies,* Vol.10, No.2 (2018) hal.157-174, https://www.jstor.org/stable/10.13169/intejcubastud.10.2.0157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama-sama membahas mengenai pengaruh atau alasan Presiden Donald Trump dalam mengambil kebijakan luar negerinya untuk Kuba. Namun, terdapat pula perbedaannya, yaitu penelitian yang akan dibahas oleh peneliti akan terfokus pada keputusan, implementasi, serta hasil dari politik luar negeri yang telah dilakukan oleh Presiden Donald Trump yang tertuang pada *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5).

10. **Jurnal yang berjudul "The Trump Administration in Latin America: Continuity and Change"[25] diteliti oleh Carlos Olivia Campos yang merupakan Profesor Asosiasi Sejarah di Univevrsitas Havana, serta Gary Prevost yang merupakan Profesor Emeritus Ilmu Politik dan Studi Amerika Latin di College of St. Benedict dan St. John University (AS) dan Asosiasi Penelitian di Universitas Nelson Mandela (Afrika Selatan).** Pada penelitian tersebut berupaya untuk menggambarkan kebijakan yang ditujukan untuk Kuba atau wilayah Amerika Latin/Karibia dan menempatkannya dalam kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump yang lebih luas. Kunci utama Presiden Donald Trump terhadap dunia diwujudkan dalam frasanya yang bernama '*America First'*. Penggunaan frasa tersebut digunakan untuk melanjutkan penarikan AS dari berbagai perjanjian internasional, termasuk perjanjian iklim dan nuklir Iran, yang mana hal tersebut telah didiskusikan oleh pendahulunya yaitu Barack Obama. Keberlanjutan yang terpenting dalam sejarah Amerika Latin

[25] Carlos Oliva dan Gary Prevost, "The Trump Administration in Latin America: Continuity and Change", diakses apda 11 Maret 2021, *International Journal of Cuban Studies*, Vol.11, No.1 (2019) hal.13-23, https://www.jstor.org/stable/10.13169/intejcubastud.11.1.0013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mereka akan tetap menjadi wilayah penting bagi AS karena alasan ekonomi dan strategis. Khususnya Kuba, yang mana pada saat masa jabatan Barack Obama telah terjadi normalisasi hubungan antara AS dengan Kuba, sehingga memunculkan harapan yang signifikan untuk masa depan Kuba. Namun, posisi Presiden Donald Trump yang kemudian menentang berakhirnya blokade, telah menandakan bahwa setidaknya untuk masa depan yang dapat diperkirakan membaik tidak akan datang dan jalan Kuba untuk ke depan telah menjadi jauh lebih jelas. Pada kedua penelitian tersebut terdapat kesamaan, yaitu saling membahas mengenai dinamika hubungan antara AS dengan Kuba. Namun, terdapat juga perbedaannya, yaitu pada penelitian yang akan dibahas oleh peneliti tidak hanya terfokus pada dinamika hubungan AS dengan Kuba, tetapi juga membahas mengenai politik luar negeri AS yang telah ditetapkan oleh Presiden Donald Trump untuk Kuba dengan melihat dinamika hubungan yang terjadi pada masa jabatan sebelumnya.

F. Argumentasi Utama

Adanya arahan kebijakan baru pada politik luar negeri AS untuk Kuba membuat Kuba kembali menjadi negara yang tertutup atau terbelakang dalam hal informasi, komunikasi, dan teknologi serta memberikan dampak yang cukup signifikan dalam hal ekonomi negaranya. Itu semua disebabkan karena Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan luar negeri yang baru pada *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5). Dikeluarkannya NSPM-5 disebabkan karena adanya faktor sejarah yang tidak harmonis antara kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara tersebut, serta faktor gaya kepemimpinan serta personalitas Presiden Donald Trump beserta jajaran pemerintahannya yang dapat mempengaruhi dalam memutuskan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan NSPM-5 tersebut memunculkan beberapa kebijakan yang baru yang dialukan oleh peemrinatah AS yaitu, adanya batasan berwisata bagi warga AS untuk ke Kuba, berakhirnya transaksi *U-Turn* serta terbatasnya akses *Information and Communications Technology* (ICT) yang berdampak pada menurunnya wisatawan AS yang datang ke Kuba, tidak adanya aktivitas impor Kuba ke AS, serta terlambatnya akses ICT di Kuba.

Berdasarkan data-data diatas, peneliti menduga bahwa penyebab terbentuknya kebijakan NSPM-5 dalam politik luar negeri AS untuk Kuba disebabkan adanya faktor sejarah yang tidak harmonis antara Amerika Serikat dengan Kuba, karakter personalitas Presiden Donald Trump beserta jajaran pemerintahannya yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta perbedaan ideologi antara Amerika Serikat yang berideologi liberal-demokratis dengan Kuba yang berideologi sosialis-komunis.

G. Sistematika Penyajian Skipsi

Bentuk dari hasil penelitian yang berjudul "Analisis Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump" akan disusun menjadi lima bab. Berikut uraian sistematika penyajian skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab pendahuluan merupakan penjelasan secara singkat arah dari penelitian yang akan dibahas, yang nantinya akan berisi tentang gambaran awal topik serta sisi penting dari permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam latar belakang masalah. Dalam bab ini juga dipaparkan rumusan masalah yang merupakan pertanyaan peneliti mengenai masalah yang akan dibahas, dan akan dijawab melalui metode penelitian. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan manfaat serta tujuan penelitian dilakukan.

2. BAB II KERANGKA TEORITIK

Pada bab ini akan dijelaskan teori serta konsep yang akan diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Teori dan konsep tersebut nantinya akan dijabarkan secara masing-masing sehingga akan menjadi suatu paragraf. Tujuan dari penjabaran kerangka teoritik tersebut guna membantu awal dari proses penelitian hingga analisis data penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menggambarkan metodologi penelitian yang akan dipakai dalam menjawab rumusan masalah penelitian, seperti metode pendekatan dan jenis penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, hingga tahapan alur penelitian atau logika penelitian.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab IV merupakan inti dari proses penelitian atau penyajian data yang kemudian akan dianalisis. Data yang disajikan berupa data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekunder yang dapat diuraikan dalam bentuk tulisan, tabel, atau gambar yang bisa mendukung hasil penelitian. Kemudian akan dijelaskan dan dianalisa hasil dari penelitian tersebut secara runtut sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini, penulis akan menarik kesimpulan dari peristiwa yang tekah diteliti diatas. Tidak hanya kesimpulan, namun pada bab ini penulis juga akan memberikan saran-saran dari masalah yang telah diteliti agar bermanfaat bagis penelitian di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIK

Pada bab ini peneliti akan menarasikan beberapa pendekatan serta perspektif yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis fakta pergeseran politik luar negeri pada masa pemerintahan Donald Trump. Peneliti menggunakan teori politik luar negeri menurut Marijke Breuning yang mana bahwa suatu kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dapat dianalisis melalui *Decision*, *Behavior*, serta *Outcome*.

Selain itu, peneliti juga akan menerjemahkan arti dari konsep *rollback*, baik secara terminologi maupun etimologi. *Rollback* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kemunduran atau perubahan dalam dunia perpolitikan maupun ekonomi.

A. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri telah memiliki tempat tersendiri dalam bidang ilmu hubungan internasional. Bahkan politik luar negeri aspeknya telah berkembang cukup luas dari ilmu politik sampai ke ilmu komunikasi. Dalam pengambilan kebijakan juga telah telah masuk ke dalam ilmu politik luar negeri. Ketika suatu negara membuat kebijakan untuk negara lain atau lingkungan internasional maka itulah arah untuk ilmu politik luar negeri. Dapat digambarkan maka politik luar negeri lebih ke dalam kebijakan atau aksi suatu negara terhadap ligkungannya serta respon dari negara tersebut baik berupa negara atau unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis lainnya, baik dalam kelompok politik, bisnis, ataupun organisasi non-pemerintah.[26]

Politik luar negeri atau bisa disebut kebijakan luar negeri yang dalam bahasa inggrisnya adalah *foreign policy*. Politik luar negeri dibentuk untuk mengatur segala kebijakan dari dalam negeri untuk luar negeri. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pasti telah melewati beberapa proses serta pertimbangan dari para pembuat kebijakan. Setiap negara tentunya memiliki politik luar negeri atau kebijakan luar negeri untuk kepentingan serta keamanan negaranya.

Menurut Marijke Breuning kebijakan luar negeri merupakan totalitas kebijakan suatu negara serta interaksinya dengan lingkungan yang berada di luar areanya. Secara tradisonal, studi tentang kebijakan luar negeri difokuskan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan dan keamanan suatu negara.[27] Dalam memahami lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri, Breuning menjelaskan 3 hal untuk menganalisa latar belakang kebijakan luar negeri dibuat, yakni:

1. ***Decision* (keputusan-keputusan)** yang merupakan suatu kebijakan atau keputusan yang telah dipilih. Kebijakan yang telah diputuskan atau dibuat akan mengarahkan kepada suatu hal yang akan menjadi sasaran utamanya. Selain itu pembelajaran mengenai latar belakang seorang pemimpin dapat membantu untuk mengetahui apa motivasi dibalik keputusan atau tindakan

[26] Asep Setiawan, Endang Sulastri, *Studi Politik Luar Negeri*, (UMJ Press: 2017)
[27] Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan serta pandangannya terhadap lingkungan internasional dan faktor internal yang mendukung. Menurut Marijke Breuning keputusan dalam pengambilan suatu politik luar negeri berada pada individu atau pemimpin. Dalam pengambilan keputusan politik luar negeri dibutuhkan pertimbangan antara peluang dan kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam konteks tersebut, Marijke Breuning membuat titik untuk memeriksa kepribadian, motivasi, serta persepsi pemimpin untuk memahami proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.[28]

2. ***Behavior*** **(perilaku)** merupakan suatu tindakan atau perilaku dimana keputusan tersebut diterapkan. Tindakan dari suatu keputusan merupakan posisi konkret suatu negara dalam melaksakanakan politik luar negerinya. Tindakan tersebut biasanya meguntungkan untuk negaranya sendiri kemudian mempengaruhi aktor luar negaranya. Para pembuat kebijakan biasanya fokus terhadap mengamankan manfaat nyata yang akan didapatkan oleh negaranya. Seperti manfaat bantuan dalam hal militer maupun pembangunan ekonomi. Tindakan dari suatu keputusan tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, karena setiap keputusan ataupun kebijakan juga tidak selalu sesuai implementasinya di masyarakat.
3. ***Outcomes*** **(hasil)** merupakan hasil yang didapatkan dari perilaku atau tindakan yang telah dilakukan. Pada umumnya hasil yang baik itu akibat

[28] *Ibid*., Marijke Breauning, "*Foreign Policy Analysis: A Comparativ Introduction*", 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kebijakan dan tindakan yang baik. Untuk melihat hasil yang telah dicapai, sangat penting untuk menganalisis bagaimana, mengapa, dan kepada siapa suatu kebijakan tersebut dibuat. Bahkan keputusan yang berhasil pun belum tentu sesuai dengan apa yang diekspektasikan, karena para pembuat kebijakan suatu negara tidak melihat bagaimana para pemimpin negara lain akan bereaksi terhadap keputusan yang telah dibuat. Negara yang kuat pun belum tentu juga mendapatkan hasil yang memuaskan, dikarenakan mereka belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. [29] Untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi negara, maka diharuskan memahami kebijakan atau keputusan serta tindakan dari kebijakan luar negeri negaranya. Dalam memahami itu semua, tidak hanya dapat dilihat oleh satu negara saja tetapi juga melihat dari interaksi antar negara-negara agar terlihat hasil dari kebijakan luar negeri yang telah diimplementasikan. Terkadang hasil yang baik juga berasal dari bagaimana respon aktor-aktor eksternal terhadap kebijakan luar negeri suatu negara.

Pada penelitian ini Presiden Donald Trump selaku pemimpin di Amerika Serikat beserta kabinet pemerintahannya dapat membuat serta memutuskan suatu kebijakan guna keuntungan serta keamanan negara AS. Sang aktor dapat memilih pilihan yang terbaik untuk kepentingan diri sendiri serta kepentingan negaranya. Presiden Donald Trump yang menggantikan posisi Presiden Barack Obama kala itu telah membuat keputusan bahwa

[29] *Ibid*., Marijke Breauning, *"Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*", hal. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan luar negeri AS terhadap Kuba telah diganti. Dengan dikeluarkannya kebijakan baru yang tertuang pada NSPM-5, maka jajaran pemerintahan Presiden Donald Trump secara langsung bertindak untuk mengimplementasikan kebijakan pada NSPM-5 yang telah diputuskan. Contoh tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah AS terhadap Kuba yaitu adanya pembatasan kembali dalam berwisata ke Kuba, pembatasan penggunaan internet di Kuba, serta melarang perusahaan AS melakukan kerjasama bisnis yang dikendalikan oleh militer Kuba.[30]

Dalam penelitian ini dapat dinalisis hasil keputusan serta tindakan dari politik luar negeri AS untuk Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Hasil tersebut dapat dilihat melalui dampak atau efek bagi Kuba yang diberikan dari perubahan politik luar negeri AS. Selain itu bisa juga melalui tanggapan atau respon aktor eksternal dan internal terhadap politik luar negeri yang ditetapkan oleh AS untuk Kuba.

Dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri dibutuhkan suatu konsep tingkat analisa. Menurut Breuning, tingkat analisa dibagi dalam tiga kelompok, yaitu tingkat *individual*, *state*, serta *system*. Ketiga tingkat analisis tersebut telah mempunyai tempatnya masing-masing dalam menganalisis politik luar negeri. Tingkat individu mempertimbangkan beberapa pilihan serta membuat keputusan, tingkat negara berperan sebagai tindakan atau perilaku dari kebijakan luar negeri, dan yang terakhir yaitu tingkat sistem internasional dimana dalam sistem tersebut terdapat negara-negara yang akan saling

[30] *Ibid*., HP, "*Trump's Cuba Policy*", ha1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berinteraksi sehingga akan memunculkan sebuah hasil dari kebijakan luar negeri yang telah diterapkan atau diaplikasikan.

Tingkat analisis dan studi kebijakan luar negeri

Tingkat analisis	Fokus kebijakan luar negeri
Individu	Pilihan atau Keputusan
Negara	Tindakan atau Perilaku
Sistem Internasional	Hasil

Tabel 2.1 (Sumber: Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction 2007)

1. Tingkat individu: analisis individu berfokus pada usaha seorang pemimpin dan pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan beberapa pilihan lalu membuat keputusan politik luar negeri negaranya. Langkah tersebut dapat membuat asumsi bahwa pilihan atau keputusan dari seorang individu dapat mencetak atau membuat sejarah baru dari hasil keputusan yang telah dibuat. Pada tingkat individu, ukuran seseorang atau individu dalam membuat keputusan dapat dilihat melalui afektif atau emosi saat membuat keputusan, rasionalitas, karakter, serta kepribadian. Untuk melihat kepribadian atau karakteristik Presiden, Eugene mengelompokkan ke dalam 4 tipe kepribadian Presiden AS, yaitu:[31]
   - Tipologi Aktif-Positif: belajar dari pengalaman, pekerja keras, kreatif, respek terhadap orang lain, bahagia, terbuka dengan ide-ide yang baru, dan efektif dalam hal bekerja

[31] Eugene R. Wittkopf, *American Foreign Policy: Pattern and Process*, (Califronia: Thomson Higher Education, 2008), hal. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tipologi Aktif-Negatif: in-konsisten, optimis dan sentimental
- Tipologi Pasif-Positif: mempertahankan kekuasaan dan cenderung berkuasa
- Tipologi Pasif-Negatif: sekedar menjalankan rutinitas dan sedikit dalam bekerja

Seorang pemimpin atau individu tidak membuat atau merancang politik luar negeri sendiri, tetapi juga bekerjasama secara tim dengan para pembuat kebijakan yang lain atau bekerja sesuai aturan birokrasi. [32]

2. Tingkat negara: analisis negara berfokus pada menganalisis faktor internal yang terjadi di negara tersebut, sehingga dapat terlihat secara spesifik tindakan atau perilaku suatu negara dalam menerapkan politik luar negerinya. Faktor tersebut dapat dilihat pada tekanan domestik suatu negara yang ikut andil dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Breuning menjelaskan terdapat beberapa aspek dalam menganalisis faktor internal, yaitu adanya kelompok yang mempunyai kepentingan, opini publik, media, kondisi ekonomi suatu negara, sejarah yang telah lalu, serta budaya yang ada pada negara tersebut.

Pada tingkat analisis tersebut ditekankan pada bagaimana faktor-faktor internal dapat mempengaruhi tindakan suatu negara dalam panggung dunia. Dalam sudut pandang *decision making* (pembuat keputusan), faktor

[32] Terdapat beberapa literatur mengenai birokrasi politik, beberapa yang diketahui contohnya Allison, *Conceptual Models and The Cuban Missile Crisis;* Allison and Zelikow, *Essence of Decision;* Bendor and Hammond, *Rethinking Allison's Models*; George, *Presidential Decisionmaking*; 't Hart et al., *Beyond Groupthink*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut seringkali digunakan sebagai arah oleh seorang pemimpin dalam mengukur keputusan yang akan dibuat. Agar teori yang dipaparkan oleh Marijke Breuning semakin kuat, Hopkins dan Mansbach juga memaparkan lebih lanjut mengenai faktor internal yang mencakup kemampuan ekonomi, politik budaya, sumber daya alam, ukuran teritorial, kohesi sosial, serta tingkat industrialisasi.[33] Tetapi faktor internal yang relevan dengan politik luar negeri AS adalah kemampuan ekonomi, ukuran teritorial, tingkat industrialisasi, serta politik budaya. Sedangkan faktor eksternal dapat terlihat pada kondisi-kondisi di sistem internasional atau global yang dapat mempengaruhi kondisi di dalam negeri.

3. Tingkat sistem: Analisis ini yang berfokus pada perbandingan atau interaksi yang terjadi antar negara. Sistem internasional dapat dideskripsikan sebagai utuhnya atau bersatunya suatu negara dalam hal kualitas dan kuantitas, contohnya dapat dilihat pada *state power* dan kekayaan suatu negara, sehingga akan dapat mempengaruhi negara lain dan sukses di panggung dunia. Namun, contoh tersebut dapat berubah seiring arus ekonomi suatu negara yang semakin meningkat, serta kapabilitas militer dan teknologi yang semakin maju. Saat ini, dengan adanya kapabilitas militer yang semakin kuat, maka suatu negara akan dapat memberanikan diri unjuk diri dalam panggung dunia dan dapat menciptakan suatu peluang untuk keuntungan negaranya. Sedangkan

[33] Hopkins, Raymond F. & Richard W. Mansbach, *Structure and Process in International Politics*, (New York: Harper&Row, 1973)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya jalinan kerjasama ekonomi antar negara dapat membuat negara-negara tersebut saling bergantung, sehingga dapat memunculkan kendala untuk negara masing-masing.

B. Kerangka Konseptual *Rollback*

Rollback merupakan istilah yang lazim dipakai dalam dunia perpolitikan dan ekonomi. Menurut kamus Cambridge, *rollback* merupakan pengurangan suatu aturan dan hukum yang dapat mempengaruhi undang-undang.[34] Namun, jika diaplikasikan ke dalam ilmu politik dapat diartikan sebagai strategi dalam mengubah kebijakan negara untuk mengantikan rezim yang sedang berkuasa. Salah satu contoh jika diskusi mengenai *rollback* yaitu bermula pada politik luar negeri AS untuk negara-negara komunis pada masa perang dingin. Meskipun pada waktu itu AS sempat gagal dalam melakukan strategi *rollback* terhadap Korea dan Kuba, namun keberhasilan datang pada saat AS melakukan strategi tersebut di Grenada. NATO pun ikut dalam mempromosikan strategi tersebut selama perang melawan kelompok Taliban. Strategi tersebut masih terus dilakukan mulai dari masa perang dingin hingga saat ini dengan nama yang lebih dikenal yaitu "pergantian rezim".

Langkah awal AS membentuk strategi *rollback* terus berdampak hingga saat ini. Dibuktikan dengan adanya perubahan politik luar negeri AS untuk Kuba pada masa transisi Presiden Barack Hussein Obama ke Presiden Donald John Trump. Perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai pergantian pemegang

[34] Dictionary Cambridge, "Meaning of Rollback in English", diakses pada 10 Oktober 2020, Cambridge University Press, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/roll-back

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan pada saat itu, karena dilihat dari sejarah bahwa AS awalnya menggunakan strategi tersebut dikhususkan untuk negara-negara komunis. Terdapat beberapa aturan atau kebijakan AS terhadap Kuba yang telah diubah oleh Presiden Donald John Trump, diantaranya yaitu:[35]

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum Amerika Serikat-khususnya patuh dalam aturan embargo Kuba serta larangan wisata
2. Meminta pertanggung jawaban pemerintah Kuba dalam kasus penindasan serta pelanggaran HAM yang telah diabaikan berdasarkan pada kebijakan Barack Hussein Obama pada kala itu
3. Meningkatkan keamanan AS dan kepentingan politik luar negeri AS serta orang-orang Kuba
4. Memberdayakan warga Kuba dalam kebebasan berekonomi dan berpolitik yang lebih luas.

[35] Thewhitehouse, "Fact Sheet on Cuba Policy", diakes pada 10 Oktober 2020, https://www.whitehouse.gov/articles/fact-sheet-cuba-policy/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti dalam menganalisis penelitian. Urutan pertama dalam bab ini yaitu batasan masalah penelitian yang mana akan dijelaskan mulai dan sampai mana masalah akan diteliti. Kemudian peneliti juga akan menganalisis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Nantinya peneliti akan menjelaskan sebab-akibat dari adanya masalah tersebut yang kemudian dinarasikan secara kualitatif.

Sehubungan dengan adanya wabah virus *covid-19* di hampir seluruh negara, maka peneliti tidak bisa terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Dengan adanya keadaan tersebut, peneliti melakukan penelitian di tempat tinggal peneliti mulai dari bulan Juli 2020 hingga Januari 2021. Peneliti akan melakukan penelitian melalui beberapa tahap menurut W. Lawrence Neuman. Dalam bab ini juga terdapat subjek, objek, tingkat analisa data, serta teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh peneliti.

A. Batasan Masalah Penelitian

Batasan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berfungsi untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan adanya batasan masalah maka ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dapat teratur alurnya dengan baik.

Batasan Masalah merupakan suatu hal yang penting dalam meneliti suatu permasalahan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam suatu penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruang lingkup yang dimaksud dalam batasan masalah yaitu objek-objek yang akan diteliti dalam suatu penelitian atau permasalahan.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017-2019.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna dari suatu permasalahan atau konflik sosial yang terjadi di lingkungan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi suatu objek penelitian yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penliti adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.[36] Peneliti memberikan interpretasi masing-masing dalam dalam memaknai suatu fakta dan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis secara induktif yaitu analisa yang dilakukan dari tema yang umum lalu ke tema yang lebih khusus.[37] Dalam studi induktif peneliti melakukan pengamatan serta

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 8-9
[37] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Edisi Ketiga (Los Angeles: Sage Publications, 2009), hal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelaah kasus-kasus terlebih dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kasus-kasus tersebut.

Menurut para ahli seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan seseorang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistik*).[38] Tidak hanya Bogdan dan Taylor, ahli lain menyampaikan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). [39] Namun disisi lain peneliti juga membutuhkan serta menggunakan data kuantitatif sebagai data pendukung analisa penelitian. Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh suatu penjelasan yang obyektif mengenai penelitian tersebut.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian eksplanatif, dimana peneliti menjelaskan suatu permasalahan yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menguji suatu hipotesa atau teori guna memperkuat atau bahkan menolak hipotesa atau teori yang telah ada. Selain itu tujuan dari penelitian eksplanatif adalah mencari sebab dan akibat dari masalah yang akan diteliti, serta menjelajah informasi atau data yang belum diketahui. Dalam

[38] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*…., hal. 4
[39] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, Thousand Oaks (CA: Sage Publications, 1998), hal 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini akan dijelaskan sebab akibat serta menjelajah informasi atau data mengenai perubahan politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu di tempat tinggal peneliti. Peneliti melakukan penelitian di rumah dikarenakan pada saat ini merebaknya wabah virus covid-19. Penelitian ini juga dilakukan oleh peneliti mulai bulan Juli 2020 sampai Januari 2021.

D. Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian berdasarkan pada tahapan yang dikemukakan oleh W. Lawrence Neuman[40], berikut diuraikan tahapan-tahapan penelitian yang berjudul "Studi Analisis Politik Luar Negeri AS terhadap Kuba pada Masa Pemerintahan Presiden Donald John Trump":

1. *Acknowledge self and context*

   Dalam suatu fenomena sosial, peneliti melakukan penelitian yang berangkat dari topik yang telah dipilih kemudian topik tersebut ditempatkan dalam konteks sosial-historis.

[40] W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Edinburgh: Pearson Education Limited, 2014) hal. 17-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Adopt a perspective*

Setelah peneliti menemukan topik yang akan diteliti, maka selanjutnya akan bergerak menuju ke penetapan perspektif atau sudut pandang dari suatu fenomena. Hal ini dapat memungkinkan peneliti untuk meneliti fenomena dari berbagai sudut pandang, sehingga nantinya akan memunculkan berbagai potensi pertanyaan dari penelitian tersebut.

3. *Design a study and collect, analyse, and interpret data*

Peneliti telah menentukan sudut pandang serta mendapatkan pertanyaan penelitian, langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu mendesain penelitian. Selanjutnya peneliti akan beranjak ke langkah proses perolehan, analisis data serta interpretasi data, yang mana ketiga proses tersebut berjalan secara bersamaan.

4. *Inform others*

Tahapan terakhir dari proses ini yaitu peneliti menuliskan hasil akhir penelitiannya dalam bentuk laporan yang berisikan deskripsi hingga penelitian yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

E. Subjek dan tingkat analisa data

Subjek penelitian atau bisa disebut juga sebagai tingkat analisa dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kuba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai tingkat analisa dalam studi hubungan internasional, peneliti berpedoman pada buku karya Mohtar Mas'oed yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". Dalam buku karya Mohtar Mas'oed, tingkat analisa mempunyai beberapa rujukan yang berkaitan dengan tingkat analisa. Dalam buku karya Mohtar Mas'oed disampaikan bahwa terdapat lima tingkat analisa dalam studi hubungan internasional, yaitu: (1) individu; (2) kelompok individu; (3) negara-bangsa; (4) kelompok negara-bangsa dalam suatu wilayah; (5) sistem global.[41] Dalam hal ini peneliti terfokus pada unit analisis negara-bangsa dikarenakan Amerika Serikat selaku negara yang mengatur atau menerapkan kebijakan terhadap Kuba, namun tetap sesuai dengan keputusan kepala negara yaitu Presiden Donald Trump.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi literasi. Hasil dari studi literasi dapat dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Dalam studi literasi dilakukan telaah data atau dokumentasi untuk mendapatkan informasi secara kontekstual. Studi literasi dapat ditelaah melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, artikel atau report, penulusuran daring, serta video wawancara yang ada di Youtube. Peneliti juga menggunakan data primer melalui *government release* serta *press release* dari Pemerintah AS dan Pemrintah Kuba yang berada di laman *website* resmi kedua negara tersebut, serta data-data yang dikeluarkan oleh pihak resmi

[41] *Ibid*., hal 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau terpercaya yang dapat mengeluarkan informasi yang diperlukan dan relevan dalam penyusunan penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif berlandaskan pada interpretasi data mengenai variabel, serta bersifat non-kuantitatif guna menjelaskan fenomena yang sedang terjadi. Teknik analisat data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan hingga setelah penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari studi literasi atau pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai teknik analisa data:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti diharuskan memahami gambaran fenomena atau peristiwa sosial yang terjadi sebelum turun ke lapangan. Namun, hal tersebut hanya bersifat sementara, karena di lapangan bisa jadi data tersebut akan terus berkembang. Setelah turun langsung ke lapangan, peneliti akan menganalisis data yang diperoleh menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono mengatakan bahwa dalam jenis penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dilakukan secara intensif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya telah jenuh.[42] Pengertian jenuh dalam hal tersebut adalah memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai penelitian yang akan diteliti, namun tetepa secara fleksibel.

[42] *Ibid*., Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal.246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian studi analisis politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis data yang telah diperoleh. Data tersebut berasal dari file-file dokumentasi, laporan setiap tahun, serta kajian dari hasil studi sebelumnya yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri AS, *White House*, serta pihak-pihak yang terkait dengan fokus politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti mengingat bahwa tidak memungkinkan bagi peneliti untuk turun langsung ke lapangan, dikarenakan merebaknya wabah virus *covid 19* di hampir seluruh dunia.

2. Analisis data lapangan menurut Miles dan Huberman

Sesuai dengan jenis penelitian yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman. Adapun model yang dimaksud sebagai berikut:

Komponen-Komponen Analisa Data Model Interaktif

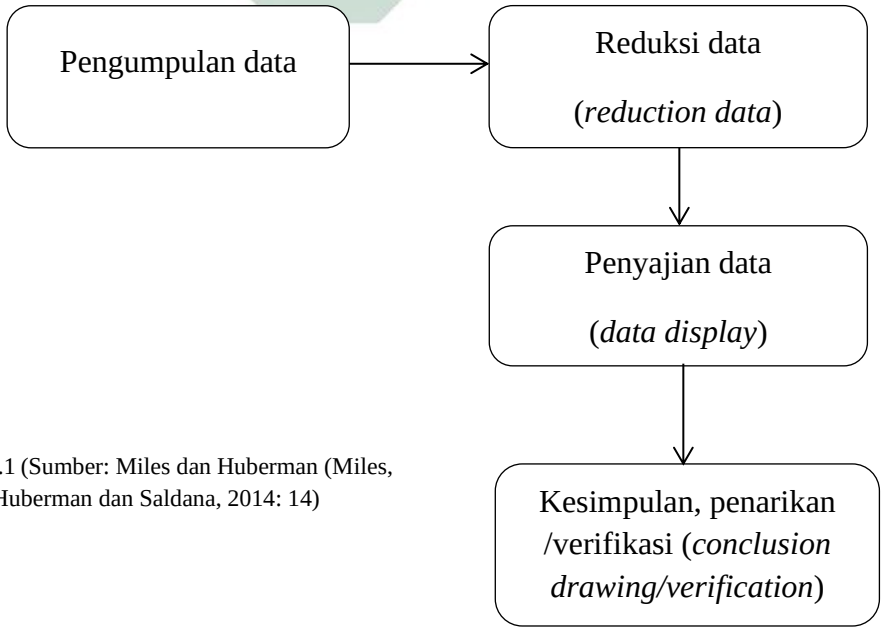

Bagan 3.1 (Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komponen-komponen analisa diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data sangat dibutuhkan oleh peneliti guna memilih, memilah dan memfokuskan data sesuai dengan data yang diperlukan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang diperoleh selama pra-lapangan yang berasal dari dokumentasi dapat berupa laporan, artikel, maupun jurnal terkait dengan sebab dan akibat dari terjadinya *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5) dalam politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump yang dipilah sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh sebab itu peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah dan mengkategorikan informasi sesuai dengan data yang diperlukan oleh peneliti. Selain itu, peroleh data secara daring juga dapat membantu peneliti dalam menemukan pola yang baik untuk memaparkan data-data yang diperoleh.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data/merangkum data yang didapat. Selanjutnya yaitu pemaparan data yang telah diperoleh sebelumnya secara daring. Penelitian dilakukan secara daring dikarenakan mengingat merebaknya wabah viurs *covid-19* yang menyebabkan peneliti tidak memungkinkan untuk turun langsung ke lapangan. Oleh sebab itu, data akan disajikan oleh peneliti dalam bentuk narasi teks, tabel, gambar, atau bagan yang diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti secara daring terkait sebab dan akibat dari terjadinya *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5) dalam politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

c. Kesimpulan, Penarikan, atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif model interaktif ala Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimulai dengan melakukan verifikasi atau pembenaran data terkait dengan politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Penarikan kesimpulan diperoleh dari data yang telah direduksi dan disajikan peneliti dengan data-data valid yang dapat diuji kebenarannya. Kesimpulan adalah jawaban singkat, padat, dan jelas dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah dipaparkan oleh peneliti sejak awal.

d. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif lebih ditekankan pada uji validitas dan kredibilitas, karena pada penelitian kualitatif kunci utama pada data penelitian adalah *valid*, *eliable*, dan objektif. Salah satu cara untuk menguji validitas, serta keabsahan data yaitu secara triangulasi. Tujuan dari dilakukannya triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif.[43] Triangulasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, serta waktu.[44] Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai macam-macam dari triangulasi:

1. **Triangulasi Sumber**

   Dalam triangulasi sumber, uji kredibilitas dan validitas dapat dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dari dokumen, arsip, laporan, ataupun artikel mengenai perubahan politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Data dari berbagai sumber dapat dideskripsikan, dipilah-pilah, dikelompokkan, mana yang mempunyai pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik menjawab rumusan masalah dari suatu penelitian.

2. **Triangulasi Teknik**

   Uji kredibilitas data dapat melalui teknik pengumpulan data yang berasal dari wawancara, dokumentasi, serta observasi. Dengan menggunakan teknik tersebut dapat memunculkan hasil data yang berbeda-beda satu sama lain.

---

[43] Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", Universitas Jambi: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3 (2020)

[44] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif, dan Konsktruktif*", (Bandung: alfabeta , 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Triangulasi Waktu

Dengan adanya perbedaan waktu serta kondisi dalam setiap penelitian, maka pengecekan melalui obersevasi, wawancara, serta yang lain dapat dilakukan secara berulang sampai menemukan kevalidan dan kredibilitas data tersebut. Peneliti melakukan obervasi data secara daring, artikel, jurnal, laporan, dan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti membagi bab IV ke dalam beberapa sub-bab. Sub-bab pertama yaitu dinamika hubungan AS dan kuba, yang mana akan dimulai pada era Perang Dingin, berakhirnya perang dingin, hingga era transisi Presiden Barack Obama ke Presiden Donald Trump. Sedangkan sub-bab kedua peneliti akan membahas mengenai analisis terjadinya NSPM-5 dalam politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump menggunakan teori *Decision*, *Behavior*, *Outcome*. Dari ketiga bagian tersebut kemudian dapat menghasilkan suatu analisis pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah peneliti.

Perolehan data yang ditemukan oleh peneliti terdiri dari berbagai sumber, antara lain berasal dari *government release* yang bisa ditemukan di *website* resmi Pemerintah AS maupun Kuba, *press release* antara kedua negara tersebut, hingga sumber data yang berasal dari artikel, jurnal, berita, maupun video mengenai topik terkait yang ada di *YouTube*.

A. Dinamika Hubungan AS-Kuba

1. Era Perang Dingin

Pada tahun 1944 Grau berhasil terpilih sebagai Presiden, serta pada tahun tersebut terjadi perubahan nama partai komunis, dari Persatuan Revolusi Komunis (Unión Revolucionaria Comunista-URC) menjadi Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosialis Rakyat (Partido Socialista Popular-PSP). [45] Grau mengikuti kebijakan yang konsiliatif dari kelompok tersebut dan mengizinkan perluasaan atau penyebaran kelompok tersebut. Khawatir jika kelompok tersebut semakin luas dan bekerja untuk di bawah pemerintah, Grau memastikan hanya sebagian dari mereka yang melakukan kebebasan dalam bertindak. Situsi tersebut terus berlanjut hingga masa kepresiden Carlos Prío Socarrás (1948-1952), yang mana ia adalah anak didik Grau.

Kegagalan Grau untuk membawa kehidupan Kuba dalam kejujuran dan ketertiban, aspirasi Presiden Eduardo Chibas, serta seorang anggota kongres autentico, menghasilkan keretakan di partai. Pada tahun 1947 Chibas dan para pemimpin autentico yang lain membentuk Partai Rakyat Kuba (Partido del Pueblo Cubano-PPC), cabang dari Orthodoks (Orthodoxo) atau biasa dikenal sebagai Partai Orthodoks (Partido Orthodoxo). [46] Dipimpin oleh Chibas, PPC menjadi gudang dari cita-cita "revolusi frustasi" dan perlindungan bagi generasi baru yang bertekad mengubah cita-cita tersebut menjadi kenyataan.

Dalam kurun waktu tiga tahun, PPC menjadi partai dengan kekuatan politik yang tangguh. Meskipun mereka tidak mempunyai sebuah rencana kerja atau program yang tergambarkan dengan baik, tetapi mereka mempunyai pengikut yang cukup besar, terutama di kalangan mahasiswa Universitas Havana. Dengan slogannya yang berbunyi "*vergüenza contra*

[45] Rex A. Hudson, *Cuba a Country Study*, Federal Research Division: Library of Congress, 4th edition, 2002) hal. 53
[46] *Ibid*., Rex A. Hudson, hal. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinero" yang artinya kehormatasn versus uang, Chibas berhasil menjadi senator terpilih, dengan program radio tiap minggunya, ia berhasil memikat hati rakyat Kuba untuk membangkitkan pikiran mereka terhadap korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan autentico.

Salah satu yang tertarik dengan gagasan Chibas adalah Fidel Castro. Ia merupakan putra dari seorang imigran Spanyol yang mana ia terlibat dalam politik ketika saat menjadi mahasiswa. Saat setelah lulus dari dunia perkuliahan, ia menjadi pengacara muda dengan bakat politik yang sangat hebat. Castro sendiri sama seperti warga Kuba yang lain, mengikuti gagasan Chibas dengan antusias karena ia telah dianggap sebagai harapan Kuba untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Namun, seketika harapan itu hilang, dan hampa karena Chibas telah melakukan bunuh diri pada tahun 1951 diakhir acara program radionya, sehingga terjadinya keretakan di dalam Partai Orthodoks.[47]

Keaktifan Fidel Castro dalam politik Kuba dimulai pada tahun 1950, ketika ia bergabung dengan Partai Orthodoks yang bertentangan dengan Partai Autentik Fulgencio Batista yang pada saat itu sedang berkuasa.[48] Sebagai seorang revolusioner, ia ingin semua orang Kuba bangkit melawan kelompok oposisi radikal terhadap pemerintahan Fulgencio Batista. Saat ia bersama dengan para revolusioner lainnya akan menduduki Barak Moncado di Santiago del Kuba, namun naas mereka tertangkap kemudian diadili lalu

---

[47] *Ibid*., Rex A. Hudson, hal. 55

[48] Gary Prevost, "Fidel Castro and the Cuban Revolution", *Headwater: The Faculty Journal of the College of Saint Benedict and Saint John's University*: Vol. 24 (2007) hal.19 https://digitalcommons.csbsju.edu/headwaters/vol24/issl/4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenjara, sehingga misi tersebut gagal dilakukan. Serangan tersebut dimaksudkan untuk memicu permberontakan umum di seluruh pulau. Masa-masa dipenjara ia habiskan untuk mempelajari filsafat politik, sejarah, dan sastra guna memperkuat filosofi revolusionernya. Selama persidangan berlangsung, ia menyampaikan pidato terkenalnya yang berjudul "*History Will Absolve Me*". Isi dari pidato tersebut tidak lebih adalah kritik untuk rezim Fulgencio Batista, menyerukan kebebasan dalam berpolitik dan sosial dengan lingkup yang lebih besar.

Setelah keluar dari penjara, mereka kemudian menghabiskan beberapa tahun lagi untuk berkumpul kembali dan memperluas basis dukungan guna menggulingkan kelompok radikal pemerintahan Fulgenco Batista yang didukung oleh AS. Dia pergi ke Meksiko bersama dengan saudaranya yaitu Raúl Castro dan membentuk kelompok *Twenty-Sixth of July*, sebuah kelompok gerilyawan revolusioner yang mencakup Ché Guevara. Di Meksiko ia dan pengikutnya melakukan pelatihan militer sebagai persiapan untuk menggulingkan pemerintahan diktator Fulgencio Batista.

Pada 2 Desember 1956, mereka berlayar ke Kuba untuk upaya revolusi kedua. Namun, ternyata perlawanan tersebut gagal kembali.[49] Terdapat beberapa korban jiwa yang meninggal, sisanya yang masih bertahan hidup melarikan diri ke Pegunungan Sierra Maestra yang terpencil untuk melanjutkan aksi mereka.[50] Kelompok tersebut disebut La Plata,

[49] *Ibid*., Gary Prevost, hal. 20
[50] Johnson and Stephen, "Fidel Castro and the Consolidation of The Cuban Revolution, 1959-1963", *Department of History and International Studies: Ekiti State University*, Nigeria (2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka membangun basecamp yang mencakup pemancar radio, dan pergi menjalankan tugas mereka yaitu melawan gerakan Fulgencio Batista. Kelompok La Plata menjangkau para petani lokal, lalu memberikan studi literasi untuk penduduk setempat guna melakukan gerakan serta kampanye perang gerilya yang dimulai dari pos-pos tentara lokal. Sebagian serangan telah berhasil dilakukan dan mereka mendapatkan sejata tambahan yang berasal dari para tentara lokal. Pada tahun 1958, mereka mulai melawan aliansi militer Fulgencio Batista. Pertempuran yang menentukan terjadi pada akhir Desember di Santa Clara di bawah kepemimpinan Che Guevara, hingga akhirnya pada 1 Januari 1959, ia mengaku kalah dan melarikan diri ke Republik Dominika bersama dengan para sekutunya, sehingga kekuasaan pada saat itu masih tergeletak di jalanan.[51]

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejadian tersebut langsung memuncak pada 1 Januari 1959. Pertama diakrenakan adanya faktor politik yang dipimpin oleh Fulgencio Batista. Kediktatoran Fulgencio Batista yang berlangsung lama dan brutal sudah tidak dapat ditoleransi oleh rakyat Kuba. Gaya administrasinya yang terlalu oligarki dan personalis sehingga mendorong banyak orang bertentangan pemerintahannya. Namun, penyebab langsung yang menghasut terjadinya revolusi pada tahun 1959 yaitu pemotogan proses politik demokrasi yang dilakukan oleh Fulgencio Batista pada tahun 1952.[52] Castro memiliki dua tujuan untuk pemerintahan

---

hal. 63 www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2017/08/WSN-87-2017-60-76-2.pdf

[51] *Ibid*., Rex A Hudson, hal. 63

[52] *Ibid*., Johnson and Stephen, hal. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baru, yaitu: untuk memenangkan kemerdekaan penuh Kuba dari dominasi politik dan ekonomi AS serta secara radikal mengubah struktur sosial Kuba yang sangat tidak setara.[53] Adanya tujuan-tujuan tersebut pastinya akan membawa pemerintahan revolusi Kuba berkonflik dengan AS, sehingga pada tahun 1958 pemerintah AS mengumumkan secara publik bahwa akan diberlakukan embargo senjata dan amunisi ke Kuba.[54]

Pada juli 1963, pemerintah AS mengumumkan kebijakan mengenai Peraturan Pengendalian Aset Kuba berdasarkan Undang-Undang Trade with the Enemy Act.[55] Kebijakan tersebut berlaku untuk sebagian besar indivdiu ataupun entitas yang tunduk pada yurisdiksi AS dan dikelola oleh Department of Treasury's Office of Foreign Asset Control (OFAC).[56] OFAC juga mengendalikan perjalanan orang-orang AS untuk bepergian ke Kuba melalui pemberian lisensi perjalanan yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, OFAC juga mengawasi mana ekspor-impor dan transaksi lain yang terjadi antara AS dengan Kuba. Sebagai aturan umum, OFAC tidak mengizinkan perusahaan AS untuk mengimpor produk buatan Kuba masuk ke dalam wilayah AS, karena dengan adanya tindakan tersebut dengan kata lain itu akan mengirim uang ke perekonomian Kuba. Kebijakan AS untuk Kuba menjadi sangat agresif, hal tersebut merupakan salah satu akibat dari

---

[53] Margaret E Crahan, "CUBA-US RELATIONS: NORMALIZATION AND ITS CHALLENGES", *The Cuba Program: Institute of Latin American Studies*, Columbia University, hal. 18 (2016)
[54] *Ibid*., Rex A. Hudson, hal. 63
[55] Linda R. Crane, "Cuba Revisited: From Revolution to Evolution", *Seattle Journal for Social Justice: The John Marshall Law School*, Volume 12, Issue 3 hal.885 (2014)
[56] *Ibid*., Linda R. Crane

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya peruahan rezim yang terjadi di Kuba. Dengan demikian, ketika hal tersebut diberlakukan, banyak warga Kuba melihat bahwa adanya embargo yang dilakukan AS menujukkan ketidaksetujuan dan pukulan kuat terhadap perubahan rezim yang terjadi.

Pada bulan April 1959, tiga bulan setelah masa revolusi Kuba yang sedang memanas, selama sebelas hari Fidel Castro berkunjung ke AS untuk bertemu dengan Presiden Dwight D. Eisenhower guna menunjukkan bahwa Kuba tidak akan lagi meminta bantuan ekonomi ke AS.[57] Namun, Presiden dwight D. Eisenhower dengan jelas tidak berniat untuk bertemu dengan Fidel Castro. Pada akhirnya sebelum Fidel Castro kembali ke Kuba, ia sempat bertemu dan berbincang dengan Wakil Presiden pada saat itu yaitu Richard Nixon. Setelah pertemuan tersebut, hubungan antara AS dengan Kuba memburuk dengan sanat cepat. Dalam waktu kurang dari setahun, Presiden Eisenhower memerintahkan CIA untuk mulai mempersenjatai dan melatih sekelompok pengasingan Kuba (yang dikenal sebagai invasi Teluk Babi).[58]

Radikalisasi Revolusi Kuba menyebabkan pecahnya hubungan diplomatik AS dan Kuba. Pada Januari 1961, kedutaan besar AS di Kuba telah menutup pintunya, tidak ada lagi hubungan politik antara AS dan Kuba,

[57] History Editors, "Castro Visits United States", diakses pada 20 November 2020, A&E Television Network (2009), https://www.history.com/this-day-in-history-/castro-visits-the-united-states
[58] *Ibid.*, History Editors

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta diberlakukannya embargo ekonomi secara penuh untuk Kuba.[59] Dalam tindakan tersebut, Presiden John F. Kennedy bertindak berdasarkan wewenang pasal 620(a) Undang-Undang Bantuan Luar Negeri tahun 1961, bahwa embargo sedang diberlakukan sesuai dengan keputusan Pertemuan Menteri Luar Negeri Sistem Antar-Amerika di Punta del Este, Uruguay.[60] yang mana Untuk bertahan hidup dari kemarahan AS pada waktu itu, Castro kemudian mengambil kuputusan untuk beralih aliansi ke Uni Soviet untuk meminta bantuan ekonomi dan militer dalam masa Perang Dingin. Ketakutan dengan adanya intervensi asing membuat otoritas Kuba memperkuat kerjasama militer dengan Uni Soviet ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada Oktober tahun 1962, Uni Soviet mulai mengirim rudal berkemampuan nuklir ke Kuba.[61] Selama 13 hari pada bulan tersebut, Presiden John F. Kennedy memperingatkan Uni Soviet untuk menghapus rudal atau menghadapi konsekuensi akan terjadinya perang nuklir. Sementara hubungan Uni Soviet yang terus mendukung Fidel Castro, membuat hubungan AS-Kuba tetap dingin. Pada tahun tersebut pula terjadi embargo ekonomi secara penuh, yang mana kejadian tersebut merupakan puncak dari ancaman terhadap keamanan internasional dalam skala global yang terjadi pada konfrontasi Timur-Barat.[62]

---

[59] Ethan Zawatsky dan Ashley Gemma, "Diplomatic Normalization between the US and Cuba in Light of Recenct Changes in US Foreign Policy More Generally", *Senior Honor Project: University of Rhode Island*, hal.3 (2015)
[60] Gerhard Peters dan John T. Woolley, "John F. Kennedy, White House Statement Concerning the Embargo on Trade with Cuba", diakes pada 20 November 2020, The American Presidency Project, https://www.presidency.ucsb.edu/node/236435
[61] *Ibid.*, Steve Jones, diakses pada 20 November 2020, https://www.thoughtco.com/us-and-cuba-have-history-of-complex-relations-3310195
[62] *Ibid*., Piotr Łaciński, hal. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadinya beberapa kegagalan dalam menggulingkan rezim Castro, AS kemudian melakukan serangan diplomatik, yang bertujuan untuk mengecualikan Kuba dari sistem Antar-Amerika, yang didasarkan pada Organisasi Amerika Serikat (OAS). Pengecualian tersebut dilakukan AS karena Kuba memasang ideologi pemerintahan "Marxis-Leninist", yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem Antar-Amerika. Mayoritas anggota organisasi tersebut meyimpulkan bahwa pemerintahan Kuba yang terjadi pada saat itu sebagai akibat ulah mereka sendiri, yang mana mereka menempatkan negaranya berada di luar margin sistem Antar-Amerika. Akibatnya, hampir semua negara di kawasan Amerika memutuskan hubungan diplomatik dan konsuler dengan Kuba.

Terdapat banyak upaya untuk membangun kembali hubungan yang akan dinormalisasi antara AS dan Kuba.Upaya pertama untuk membangun kembali hubungan diplomatik antara AS dan Kuba terjadi pada masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy. Pada tahun 1963, jurnalis Prancis Jean Daniel menyampaikan pesan Presiden John F. Kennedy kepada Fidel Castro, pesan tersebut kemudian digambarkan oleh Fidel Castro sebagai "*a gesture…an indication of a desire to establish contact*". [63] Terdapat beberapa pesan yang disampaikan kepada Fidel Castro melalui jurnalis Jean Daniel, antara lain yaitu menjelaskan bahwa AS akan mengakhiri embargo dagang jika Fidel Castro mengakhiri dukungannya kepada kaum ideologi kiri di wilayah tersebut. Namun, hanya 72 jam setelah pesan disampaikan,

[63] *Ibid*., Ethan Zawatsky dan Ashley Gemma, hal. 5 (2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden John F. Kennedy terbunuh. Setelah kejadian tersebut, Fidel Castro khawatir jika rezimnya akan disalahkan atas peristiwa kematian John F Kennedy.

Normalisasi hubungan yang terjadi pada saat Presiden Lyndon Johnson gagal dilaksanakan karena terlalu banyaknya permintaan atau persyaratan yang dilayangkan oleh Kuba. Beberapa tuntutan dari AS yang dibuat untuk Kuba, termasuk untuk Fidel Castro yaitu memutskan hubungan dengan Uni Soviet, menghentikan semua kegiatan yang berbau "revolusioner" di Amerika Latin, serta melakukan pembicaraan tentang ganti rugi untuk kepentingan bisnis AS. Selanjutnya pada masa Presiden Richard Nixon, proses negosiasi mengalami kemunduran. Dalam kasus Presiden Kennedy dan Johnson, hubungan kedua negara tersebut masih terbuka dan berjalan dengan dengan baik, meskipun tidak ada keberhasilan yang terjadi dalam normalisasi hubungan diplomatik.

Usaha dalam penjalinan kembali hubungan antara AS dan Kuba juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Carter. Pada masa pemerintahan Presiden Carter, adanya keterlibatan di wilayah Afrika ditentang oleh AS. Kesempatan untuk menormalisasi hubungan AS-Kuba juga tidak dapat tercapai dikarenakan adanya keterlibatan faktor-faktor eksternal yang bertentangan dengan kepentingan AS. Pada masa Presiden berikutnya, masing-masing memiliki proses negosiasi yang hampir sama dan hasil yang sama, yaitu sama-sama gagal karena faktor domestik dan ketidakmauan untuk mengakui tuntutan. Pada masa Presiden Clinton, terdapat beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberhasilan dalam menegosiasikan perubahan mengenai hubungan AS dan Kuba. Namun, dalam keberhasilan yang didapat tersebut, Presiden Clinton juga menghadapi banyak hambatan domestik yang menempatkan sanksi yang lebih keras terhadap Kuba dengan disahkannya Undang-Undang Demokrasi Kuba.[64] Selama pemerintahan Presiden Clinton, program lain yang membantu proses normalisasi hubungan AS dengan Kuba yaitu Diplomasi Bisbol serta kerjasama dalam melawan narkotika. Kala itu Oriel memainkan pertandingan bisbol melawan tim Kuba.

Lima puluh lima tahun bermusuhan, sepuluh Presiden AS berturut-turut telah berusaha dengan setiap cara untuk menggulirkan kembali revolusi Kuba, dari invasi pengasingan ke pembunuhan, perang paramiliter yang terselubung, subversi, serta embargo ekonomi. Beberapa presiden juga melakukan upaya tentatif untuk menormalkan hubungan, namun hasilnya nihil. Setelah Krisis Rudal 1962, John F. Kennedy berharap untuk mengeksploitasi kemarahan Fidel Castro kepada Uni Soviet karena telah menarik rudal dengan menawarkan *rapproachement*. Posisi Kuba yang berada diantara dua negara adi daya, memberikan AS dorongan untuk menormalisasi hubungan dengan Kuba, jika bisa menarik Kuba keluar dari dekapan Uni Soviet. Hal tersebut merupakan tujuan dari upaya awal *rapprochement* yang dilakukan oleh Presiden John F. Kennedy, Henry Kissinger yang merupakan Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden Gerald Ford, dan Presiden Jimmy Carter. Sebagai contoh, tuntutan

[64] *Ibid*., Ethan Zawatsky dan Ethan Gemma, hal.6 (2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AS kurang berfokus pada pengaturan politik dan ekonomi Kuba daripada kebijakan luar negeri Kuba, khususnya mengakhiri dukungan Kuba untuk ber-revolusioner di luar negeri dan mengurangi hubungan militernya dengan Uni Soviet. [65] Inisiatif Presiden John F. Kennedy untuk menormalisasi hubungan dengan Kuba terputus seketika dikarenakan ia menjadi korban pembunuhan. Lalu inisiatif Henry Kissinger dan Jimmy Carter tidak ada titik terang dikarenakan ikatan Kuba dengan Uni Soviet sangatlah erat. Dapat dibuktikan ketika Kuba mengirim pasukannya ke Angola dan Ethiopia dengan dukungan logistik Uni Soviet, sehingga AS menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan eskalasi dari Perang Dingin dan kembali melanjutkan kebijakan isolasi dan penolakan ekonominya.[66]

2. Era Berakhirnya Perang Dingin

Semenjak Presiden John F. Kennedy mengumumkan bahwa AS akan melanjutkan embargo ekonomi Kuba secara penuh pada tahun 1961, berbagai tindakan dari para eksekutif dan legislatif telah memperkuat ataupun melemahkan sanksi rezim. Presiden menunjukkan bahwa embargo akan menghilangkan Pemerintah Kuba dari pertukaran dollar yang berasal dari penjualan produk-produknya di AS. Hilangnya pendapatan tersebut akan mengurangi kapasitas rezim Fidel Castro yang terkait erat dengan Uni

[65] William M. Leogrande, "Normalizing US-Cuba Relations: Escaping the Shackles Of the Past", (UK: The Royal Institute of International Affairs, John Wiley & Sons, 2015) hal. 475
[66] *Ibid*., William M. Leogrande, hal. 475 (2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soviet, sehingga kemungkinan dapat membahayakan keamanan AS dan negara-negara lain di belahan bumi.

Berakhirnya Perang Dingin, menyebabkan longgarnya kebijakan keamanan AS terhadap Kuba. Terjadinya krisis ekonomi Kuba disebabkan karena runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989, dan embargo AS kala itu yang hanya memperparah kesulitan ekonomi disana. Adanya embargo membuat Kuba mengalami kekurangan makanan, obat-obatan, energi, dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, adanya pembatasan dalam perjalanan atau berwisata yang diberlakukan oleh AS telah menekan potensi ekonomi Kuba dalam hal pariwisata, serta terbatasnya pula pertukaran budaya dan pendidikan antara kedua negara tersebut. Dimulai pada awal 1990-an pemerintah Kuba menerapkan sejumlah reformasi yang secara fundamental mengubah wajah ekonomi Kuba.[67] Dengan adanya beberapa reformasi membuat batasan dalam ekonomi domestik mereda sehingga Kuba dapat membuka diri untuk investasi asing. Dimulai dari mengembangkan sektor pariwisata serta merangkul beberapa wiraswasta di Kuba untuk 150 pekerjaan yang berbeda.[68]

Setelah berakhirnya hubungan antara Uni Soviet dengan Kuba, Fidel Castro beralih aliansi kepada Afrika. Namun, pada tahun 1992 Fidel Castro mengumumkan bahwa Kuba tidak lagi memberikan dukungan material untuk gerakan revolusioner di Luar Negeri.[69] Berdasarkan laporan tahunan

---

[67] Lilah Rosenblum, "A Time for Change: Rethinking US-Cuba Policy", *Washington Office on Latin America*, hal.5 (2002)
[68] *Ibid*., Lilah Rosenblum, hal.5 (2002)
[69] *Ibid*., William M. Leogrande, hal. 476 (2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Luar Negeri AS mengenai Pola Terorisme Global mengkonfirmasi bahwa bantuan Kuba kepada revolusioner asing telah berakhir dikarenakan kurangnya sumber daya dan keinginan Kuba untuk kembali menjali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tetangga.[70]

Kekuatan politik dan keuangan warga Amerika-Kuba secara efektif diselenggarakan oleh Jorge Mas Canosa pada Cuban American National Foundation (CANF) guna memberikan masyarakat kekuatan veto secara virtual di bawah kebijakan AS dari tahun 1981-2008.[71] Lebih dari dua dekade, CANF berhasil meraih kemenangan politik, termasuk penciptaan Radio dan TV Martí, Undang-Undang Demokrasi Kuba 1992 (yang memperketat embargo dengan harapan membawa rezim Kuba ke titik runtuh setelah Uni Soviet menghilang) serta Undang-Undang Kebebasan Kuba dan Solidaritas Demokrat 1996 (alias Helms-Burton), yang menulis embargo menjadi undang-undang.[72]

Kongres AS telah memperketat embargo terhadap Kuba. Embargo mencegah bisnis AS untuk mengekspor barang ke Kuba atau berinvestasi ke Kuba. Kongres AS memang sempat melonggarkan embargo pada tahun 2000 dengan disahkannya Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (TSRA), yang mencabut pembatasan ekspor komoditas

---

[70] U.S. Department of State, "Patterns of Global Terorism, 1993", (Washington DC: Department of State, 1994) hal. 22
[71] *Ibid.*, William M. Leogrande, hal. 476, (2015)
[72] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian, alat kesehatan, dan obat-obatan.[73] Namun, sebuah laporan pada Februari 2001 menyatakan AS telah kehilangan hingga 1 milyar dollar dalam setahun karena kehilangan kerjasama dagang dengan Kuba.[74] Beberapa badan pemerintah juga telah melemahkan embargo dengan mengarahkan Departemen Keuangan untuk memperbaharui Cuban Assets Control Regulation (CACR) yang masih dalam batas-batas Helms-Burton (nama lain dari Undang-Undang Demokrasi Kuba dan Solidaritas Kuba), TSRA, serta CDA (Cuba Democracy Act).[75] Pada tahun 2002 Presiden George Bush mengumumkan inisiatifnya untuk "New Cuba" guna mendorong kebebasan di Kuba, membuat hidup lebih baik bagi rakyat Kuba, dan memberika rakyat Kuba kontrol yang lebih besar terhadap takdir ekonomi dan politik mereka.[76]

Dalam beberapa tahun menjalani masa reformasi, ruang politik telah terbuka secara besar-besaran di Kuba. Karena beberapa keadaan, kebijakan yang kuat tersebut mulai melemah, sehingga menciptakan peluang bagi kepentingan lain yang lebih besar untuk masuk. Dengan adanya beberapa tekanan yang berasal dari kelompok kemanusiaan, agama, pertanian, dan kepentingan bisnis, serta adanya dukungan kongres yang berkembang guna

---

[73] U.S. Department of The Treasury, "Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act of 2000", diakes pada 25 November 2020, https://home.treasury.gov/system/files/126/tsra.pdf hal. 1516

[74] International Trade Commission, "*The Economy Impact of U.S. Sanctions with Respect to Cuba*", (2001)

[75] Ben Birnbaum, dkk., "United States-Cuba Relations: Policy Recommendations to Advance Normalization", (Woodrow Wilson School of Public and Internarional Affairs: Princeton University Workshop Report, 2016)

[76] U.S. Department of Treasury, "2003 Amendments to the Cuban Assets Control Regulations", diakses pada 25 November 2020, Office of Foreign Assets Control, (2003) https://home.treasury.gov/system/files/126/fr68_14141.pdf, hal.14141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meringankan embargo AS terhadap Kuba beberapa tahun terakhir. Sebagian anggota kongres percaya bahwa kebijakan AS terhadap Kuba telah ketinggalan zaman dan tidak efektif. Beberapa dukungan tersebut terjadi karena adanya alasan kemanusiaan dan ekonomi. Meskipun dukungan publik serta kongres yang akan meringankan embargo Kuba, namun, terdapat beberapa individu legislatif di kantor DPR serta anggota kongres Kuba-Amerika yang telah berulang kali memblokir usaha tersebut.

Adanya perubahan dalam memilih oleh orang Amerika-Kuba terlihat jelas pada masa pemilihan Presiden tahun 2008. Kebijaksanaan politik yang konvensional menyatakan bahwa kandidat yang berasal dari Partai Demokrat perlu memenangkan suara sebesar 30% dari orang-orang Amerika-Kuba untuk membawa kemenangan Florida.[77] Sebelum tahun 2008, satu-satunya kandidat Presiden yang melampaui batas angka tersebut adalah Bill Clinton pada tahun 1996 (dengan 35% yang berasail dari orang Amerika-Kuba).[78]

Pada masa pemeirntahan Presiden Barack Hussein Obama, ia telah mengejar beberapa kebijakan Kuba melalui perintah para eksekutif, terutama yang berhubungan dengan CACR. Presiden Barack Hussein Obama secara resmi menduduki Gedung Putih pada tahun 2009, yang mana ia sangat menyadari bahwa adanya kebijakan permusuhan telah gagal dan merusak kepentingan AS secara luas, namun langkah tentatifnya untuk

[77] *Ibid*., William M. Leogrande, hal. 479 (2015)
[78] *Ibid*.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengubah kebijakan-kebijakan terhenti selama tahun pertamanya.[79] Pada tahun 2009, pemerintah AS melonggarkan pembatasan dalam perjalanan ke Kuba, pengiriman uang, meningkatkan arus informasi kepada masyarakat Kuba, serta transaksi resmi yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi.[80] Pembaruan kebijakan lebih lanjut dilakukan pada tahun 2011, yang mana memperluas perjalanan dan pengiriman uang, termasuk peningkatan perpindahan orang-orang dari AS ke Kuba, begitupun sebaliknya dari Kuba ke AS, serta perjalanan untuk tujuan keagamaan.[81]

Hasil pemilu pada tahun 2012 semakin mencolok. Terlepas dari daya tarik kandidat Mitt Romney terhadap komunitas tradisional anti-komunisme, Barack Hussein Obama berhasil memenangkan hampir setengah suara orang Amerika-Kuba di Florida. Keberhasilan tersebut setelah ia menentang kebijakan yang konvensional yang mana bahwa hanya platform "menjadi tangguh di Kuba" yang akan dijual di Florida Selatan, ia ubah menjadi dinamika politik domestik dari masalah tersebut dan membuat pemikiran baru bahwa Kuba layak secara politik. Terpilihnya kembali Presiden Barack Hussein Obama pada tahun 2012, ia membuat keputusan untuk secara fundamental mengubah kebijakan AS dari permusuhan menjadi hubungan yang saling terlibat dan koeksistensi. Mayoritas baik secara nasional

---

[79] William M. leogrande, "No Time to Lose: Navigating the Shoals of the New U.S.-Cuba Relationship", A Joint Project of The Cuba Program: Institute of Latin American Studies, Columbia University, hal. 19 (2016)

[80] U.S. Department of Treasury, "Cuban Assets Control Regulations", diakses pada 25 November 2020, Office of Foreign Assets Control, Treasury (2009) https://home.treasury.gov/system/files/126/CACR_Amendments_09032009.pdf

[81] U.S. Department of Treasury, "Cuban Assets Control Regulations", diakses pada 25 November 2020, Office of Foreign Assets Control, Treasury (2011), https://home.treasury.gov/system/files/126/fr76_5072.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun orang-orang dari Partai Demokrat dan Republik setuju untuk melakukan normalisasi serta mendukung setiap opsi yang akan diubah. Di Washington, para pejabat pemerintahan akhirnya yakin bahwa masalah politik ini akan benar-benar berubah. Pada tahun 2012 amandemen undang-undang mengesahkan pemrosesan transfer dana untuk misi diplomatik negara ketiga di Kuba dan pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh Kuba ke pesawat AS, termasuk overfligt Kuba atau pendaratan darurat di Kuba.[82]

Butuh waktu enam tahun Presiden Barack Hussein Obama untuk memenuhi janji kampanyenya pada tahun 2008 untuk awal yang baru dengan Kuba. Pada tahun 2014 kepentingan AS dengan Kuba telah menyatu; bagi keduanya, hubungan normal lebih masuk akal daripada terus melanjutkan sikap yang antagonis diantara keduanya. Pada 17 Desember 2014 Presiden Barack Hussein Obama mengumumkan bahwa ia dan Presiden Kuba yaitu Raúl Castro telah setuju untuk menormalkan hubungan.[83] Adanya peluang perdagangan dan perjalanan yang dibuka kembali oleh Presiden Barack Hussein Obama dimaksudkan untuk menciptakan pemangku kepentingan dalam mempertahankan dan memperpanjang kebijakan baru.

---

[82] U.S. Department of Treasury, "Cuban Assets Control Regulations", diakses pada 25 November 2020, Office of Foreign Assets Control, Treasury (2012) https://home.treasury.gov/system/files/126/fr77_71530.pdf

[83] William M. Leogrande, "Reversing the Irreversible: President Donald J. Trump's Cuba Policy", diakses pada 30 November 2020, Institut des Amériques, hal. 1 (2017) http://journals.openedition.org/ideas/2258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk dari adanya awal yang baru tersebut terlihat dalam kesetujuan Presiden Obama dalam menyambut partisipasi Kuba dalam KTT Ketujuh Amerika pada bulan April tahun 2015 di Panama.[84]

Gambar 4.1 (Sumber: The White House President Barack Obama, The Seventh Summit of the Americas: The President's Trip and a Historic Meeting, 2015)

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Barack Hussein Obama dan Presiden Raúl Castro bertemu secara langsung dan mereka menegaskan komitmen untuk menormalkan hubungan dan membahas masalah yang perlu diselesaikan. Dalam statement nya, Presiden Obama menyatakan bahwa

> *"This is obviously an historic meeting." ... "We are now in a position to move on a path to the future. There are still going to be deep and significant differences…But we can disagree with the spirit of respect and civility, and over time it is possible for us to turn the page and develop a new relationship. I can say with all sincerity to make sure that the people of Cuba are prosper to live in freedom and security, and enjoy a*

[84] *Ibid*., William M. Leogrande, "No Time to Lose: Navigating the Shoals of the New U.S.-Cuba Relationship, hal. 20 (2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

connection with the world to thrive their incredible talents and ingenuity.”[85]

Sedangkan dalam statement yang disampaikan oleh Presiden Raul Castro yaitu

“…. We are willing to discuss every issue between Cuba and United States. We shall continue advancing in the meetings which are taking place in order to reestablish relations between our countries. We shall open our embassies. We shall visit each other, having exchanges, people to people. And all that matters is what those neighbors can do. But we need to be patient—very patient….”[86]

Gambar 4.2 (sumber: Reuters, *U.S. Presiden Barack Obama and Cuba’s President Raul Castro in Havana*, March 21, 2016)

Dalam kedua statement tersebut telah terlihat bahwa hubungan antara AS-Kuba segera membaik yang diawali dengan pertemuan kepala negara dua tersebut. Kedua kepala negara telah bersepakat untuk menjalin hubungan baik kembali setelah beberapa dekade terus memanas. Namun,

[85] The White House, “Remarks by President Obama and President Raúl Castro of Cuba Before Meeting”, diakses pada 30 November 2020, the White House: Office of the Press Secretary, Panama, (2015) https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/11/remarks-president-obama-and-president-raul-castro-cuba-meeting

[86] *Ibid*.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua proses normalisasi tersebut tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan butuh kesabaran yang sangat ekstra agar tidak menimbulkan perpecahan lagi. Setelah upacara pengibaran bendera di Kedutaan Kuba pada 20 Juli 2015, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez bertemu dengan Sekretaris Negara AS yaitu John Kerry untuk membahas masalah keprihatinan bersama mengenai migrasi, perdagangan manusia, penegakan hukum, kerjasama mengenai kontra narkotika, isu lingkungan, telekomunikasi, dan internet.[87] Kedua pemerintah membentuk kelompok kerja diplomat untuk mulai mengurus isu-isu yang kompleks. Untuk mengurus proses normalisasi, mereka membentuk Komisi Bilateral yang mana dalam komisi tersebut komite pengarah akan bertemu setiap tiga bulan untuk meninjau kemajuan dan menetapkan agenda untuk serangkaian kelompok kerja yang lebih khusus dan ahli dalam mengatasi masalah tertentu.

Setelah 88 tahun lamanya tidak berkunjung ke Kuba, Presiden Barack Hussein Obama menjadi Presiden pertama yang berkunjung ke Kuba. Perjalanannya ke Kuba tepat setelah sebulan AS dan Kuba menandatangani perjanjian untuk memungkinkan adanya penerbangan komersial antara kedua negara untuk pertama kalinya dalam lebih dari 55 tahun.[88] Dalam perjalanan bersejarah tersebut, ia menyoroti pencapaian kebijakan dalam

[87] John Kerry, "Press Availability with Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez", diakses pada 2 Desember 2020, https://2009-1017.state.gov/secretary/remarks/2015/07/245094.html
[88] Cfr, "U.S. Cuba Relations 1959-2021", diakses pada 2 Desember 2020, https://www.cfr.org/timeline-us-cuba-relations

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlibatannya serta usahanya dalam mempercepat laju proses normalisasi. Terdapat tujuan dari adanya kunjungan tersebut, yaitu untuk membuat kemajuan sebanyak mungkin Presiden Barack Obama menjabat, sehingga Presiden berikutnya baik dari Partai Republik maupun Demokrat akan mengakui bahwa pembukaan kembali jalan ke Kuba dapat melayani kepentingan AS dan hal tersebut harus tetap dilanjutkan. Hubungan komersial merupakan pusat dari strategi tersebut. Semakin banyak kerjasama atau kontrak yang dijalin antara perusahaan-perusahaan AS, maka akan semakin banyak pula momentum yang akan diangkat pada embargo tahun selanjutnya, serta akan semakin menyulitkan lawan dari adanya hubungan baru tersebut untuk menggulirkannya kembali.

B. Analisis *National Security Presidential Memorandum-5* dalam Politik Luar Negeri AS

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis politik luar negeri AS pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump melalui tiga tahapan, yaitu *Decision*, *Behavior*, dan *Outcome*. Pada setiap tahapan, peneliti akan menganalisis menggunakan data-data yang telah terkumpul sebelumnya, guna mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Tahap pertama dalam analisis politik luar negeri adalah *decision* atau keputusan dari Presiden Donald Trump dalam menetapkan kebijakan politik luar negeri AS untuk Kuba. Setelah peneliti melakukan tahap analisis *decision*, selanjutnya peneliti menganalisis *behavior* atau tindakan dari kebijakan AS terhadap Kuba yang telah diputuskan. Lanjutan dari tahap *behavior* yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

outcome atau hasil, yang mana dalam tahap tersebut peneliti akan menganalisis hasil dari *decision* serta *behavior* yang telah dilakukan. Hasil tersebut bisa berwujud dampak dari adanya keputusan atau kebijakan Presiden Donald Trump selaku pemimpin negara AS yang telah ditetapkan terhadap Kuba. Dengan begitu, setelah semua tahapan telah dianalisis oleh peneliti, maka peneliti akan menemukan beberapa jawaban alasan Presiden Donald John Trump mengeluarkan NSPM-5 dalam politik luar negerinya terhadap Kuba.

Alasan terjadinya NSPM-5 dalam politik luar negeri AS terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump menjadi pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti memiliki anggapan bahwa terjadinya NSPM-5 adalah guna memperkuat kebijakan serta memberi batasan kembali kepada Kuba.

> *"I am cancelling the last administration's completely one-sided deal with Cuba…. We will never, ever blind to it. We know what is going on and we remembered what happened."*[89]

Pidato tersebut muncul karena Presiden Donald Trump mengingat tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kuba pada saat kejadian Krisis Rudal Kuba, yang mana kala itu Kuba dibantu oleh Uni Soviet mengancam AS dengan rudal-rudal yang dapat merusak satu kota besar dalam waktu sekejap.[90]

---

[89] Dan Merica, "*Trump unveils new rrestrictions on travel, business with Cuba*", diakses pada 4 Februari 2021, CNN Politics (2017) https://edition.cnn.com/2017/06/16/politics/trump-cuba-policy/index.html

[90] *Ibid*., Dan Merica, diakses pada 4 Februari 2021, https://edition.cnn.com/2017/06/16/politics/trump-cuba-policy/index.html diakses pada 4 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Statement tersebut disampaikan pada saat Presiden Donald Trump menghadiri penanda tanganan arahan kebijakannya terhadap Kuba di Miami.[91]

Perbedaan mendasar yang menyebabkan tidak harmonisnya kedua negera tersebut adalah ideologi yang tidak sejalan, sehingga muncullah embargo AS terhadap Kuba yang telah ada sejak era Perang Dingin. Selain faktor-faktor diatas, terdapat faktor lain alasan politik luar negeri AS diubah yaitu tidak maunya Presiden Donald Trump untuk bekerjasama dengan rezim yang brutal dan otoriter.[92]

Jika saja AS tidak melakukan embargo, maka peneliti memiliki anggapan bahwa Kuba juga tidak akan tertutup oleh dunia internasional serta lambat dalam beberapa hal, seperti ekonomi, ICT, serta wisata, pada era globalisasi yang tidak ada batasnya. Dan fakta yang terjadi pun, Kuba kembali merasakan embargo atau sanksi ekonomi yang ditetapkan oleh AS pada masa pemerintahan Presiden Donald John Trump.

1. Faktor atau Alasan Terjadinya *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5)

Seperti yang telah dibahas dalam kerangka teoritik pada bab II, bahwa untuk menganalisis politik luar negeri menurut Marijke Breuning tahap pertama analisis menggunakan *decision* atau keputusan. *Decision* merupakan suatu keputusan yang telah dibuat atau ditetapkan oleh aktor utama negara

---

[91] *Ibid*.,

[92] Clark Mindock, "Donald Trump announces new cuba restrictions: we will not be silenced in the face of communist oppression", diakses pada 4 Februari 2021, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-cuba-travel-restrictions-what-does-it-mean-obama-rollback-expert-explained-a7794226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Kepala Negara untuk membuat suatu kebijakan terhadap negara lain ataupun isu yang lain.

Dengan background keluarga seorang pebisnis, ia memberanikan diri untuk mencalonkan diri mewakilkan partai republik sebagai Presiden AS ke-45. Bisnis yang dikelola oleh keluarga besar Donald Trump berawal dari sang kakek yang berimigran dari Jerman ke Amerika, dari menjadi tukang cukur, pengusaha hotel, pengusaha emas, dan kemudian menjadi seorang pengusaha *real estate* di New York. Kesuksesan kakeknya terus menerus menurun hingga ke cucunya yaitu Donald Trump yang mana diketahui bahwa ia merupakan pengusaha yang sukses dan telah menguasai beberapa wilayah di Amerika. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Donald Trump merupakan keluarga pebisnis yang sukses yaitu berdirinya Grand Hyatt di New York pada tahun 1980, berdirinya The Trump Organization, Trump Tower, dan *franchies* program televisi.[93] Terjunnya Donald Trump ke dunia politik diawali pada tahun 1987, yang mana ia bergabung dengan Partai Republik. Namun, selang dua tahun kemudian ia berpindah haluan keluar dari partai dan berdiri sendiri sebagai independen. Dan selanjutnya pada tahun 2001 ia berkoalisi dengan Partai Demokrat, lalu pada akhirnya tahun 2012 ia kembali bergabung dengan Partai Republik sampai ia terpilih menjadi Presiden.[94]

Terpilihnya Presiden Donald John Trump sebagai Presiden AS yang ke-45 merupakan seorang pengusaha, selebriti, serta pemula dalam hal politik,

[93] Biography Editors, "Donald Trump Biography", diakses pada 15 November 2020, https://www.biography.com/us-president/donald-trump
[94] *Ibid*.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ia berhasil mengejutkan publik dengan kemenangannya. Kekejutan tersebut lantaran Donald Trump tidak pernah mempunyai latar belakang seorang politisi, terkenal selalu membuat keputusan yang kontroversial, serta bersifat independen. Sehingga dengan kepribadian tersebut ia terus mengutamakan keuntungan untuk dirinya, negaranya, serta orang-orang disekitarnya.

> "*Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families…. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interest first.*"[95]

Gambar 4.4 (Sumber: Getty, Politico (2017) https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907)

Sebelum mengambil keputusan, Presiden Donald Trump tentunya akan mempertimbangkan beberapa aspek yang memungkinkan dapat menguntungkan negaranya, latar belakang kehidupannya pun juga ikut andil dalam membuat keputusan yang akan diambil. Seperti yang telah dikatakan

[95] Politico Staff, "Full Text: 2017 Donald Trump Inauguration Speech Transcript", diakses pada 8 Desember 2020, https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas, dalam pidato pelantikannya, Presiden Donald Trump telah mengatakan bahwa setiap keputusan yang diambil dibuat hanya untuk menguntungkan orang-orang Amerika saja dan kepentingan negaranya.

Pada 16 Juni 2017, dengan tipe kepemimpinan yang aktif-negatif yaitu in-konsisten, Presiden Donald Trump mengeluarkan *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5) tentang penguatan kebijakan AS terhadap Kuba.[96] Pada memorandum tersebut diuraikan tujuan dibentuknya NSPM, beberapa kebijakan administrasi terhadap Kuba, serta implementasi kebijakan yang akan diambil oleh kepala departemen dan lembaga. Tujuan dari dikeluarkannya NSPM-5 yang ditetapkan oleh Presiden Donald John Trump adalah

> *"…to improve and respect for human rights, and increased free enterprise in Cuba. The Cuban people have long suffered under a Communist regime that suppresses their legitimate aspiration for freedom and prosperity their essential human dignity."*[97] *"My Administration's policy will be guided by the national security and foreign policy interest of the United States, as well as solidarity with the Cuban people. I will seek to promote a stable, prosperous, and free country for the Cuban people."*[98] *"The initial actions set forth in this memorandum, including restricting certain financial transactions and travel…"*[99]

Pada *statement* tersebut, tujuan dari diputuskannya NSPM-5 karena untuk memberikan kebebasan HAM pada rakyat Kuba dari rezim komunis. Kebijakan tersebut dilakukan namun tetap menimbang keamanan serta

---

[96] U.S. Department of State, "Economic Sanctions Policy and Implementation: Cuba Sanctions", diakses pada 8 Desember 2020, https://www.state.gov/cuba-sanctions
[97] Federal Register, "Strengthening the Policy of the United States Toward Cuba", *The Daily Journal of the United States Government*, https://www.federalregister.gov/d/2017-22928/p-30 diakses pada 8 Desember 2020
[98] *Ibid*., diakses pada 8 Desember 2020, https://www.federalregister.gov/d/2017-22928/p-32
[99] *Ibid*., diakses pada 8 Desember 2020, https://www.federalregister.gov/d/2017-22928/p-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan AS. Presiden Donald Trump juga mengumumkan serta menandatangani pembatalan sebagian normalisasi hubungan dengan Kuba, di Miami.[100]

Gambar 4.5 *Presiden Trump signs an executive order reversing some Obama administration Cuba policies in Miami* (Sumber: Carlos Barria, Reuters (2017) https://www.cfr.org/timeline-us-cuba-relations)

"*We will not be silent in the face of communist opression any longer.* "[101]

Pada penggalan pidato Presiden Donald Trump diatas, dapat digambarkan tujuan dari adanya sanksi baru atau pembatasan kembali AS terhadap Kuba, yaitu dikarenakan Presiden Donald Trump selaku Kepala Negara AS tidak ingin dan tidak akan tinggal diam jika negaranya menghadapi penindasan dari komunis.

[100] Francpis Murphy, "Cuba Calls Trump Speech on Island 'grotesque spectacle'", diakses pada 8 Desember 2020, https://www.reuters.com/article/us-usa-cubaforeignminister-idUSKBN19A21R

[101] Steve Holland, "Donald Trump orders clampdown on travel, trade in revised Cuba policy", diakses pada 8 Desember 2020, https://globalnews.ca/news/3532976/donald-trump-cuba-policy-2/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden Donald Trump juga menyerukan beberapa kebijakan pada NSPM-5 berupa penegakan yang lebih ketat terhadap larangan perjalanan bagi orang Amerika pergi ke Kuba sebagai turis, memastikan kepatuhan pada larangan undang-undang tentang berwisata ke Kuba, mencegah dolar AS digunakan untuk mendanai pemerintahan yang didominasi oleh militer yang represif, serta melarang perusahaan-perusahaan AS melakukan bisnis atau usaha dengan entitas yang dikontrol oleh militer Kuba. Presiden Donald Trump memastikan bahwa kebijakan yang ada pada NSPM-5 akan memajukan kepentingan AS serta rakyat Kuba. Kepentingan tersebut berupa[102]:

1. Memajukan HAM di Kuba
2. Mendorong pertumbuhan sektor swasta yang independen dan tidak ada kendali pemerintah
3. Menegakkan perintah yang terakhir untuk memindahkan warga Kuba dari AS
4. Melindungi keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan keselamatan AS

Kebijakan yang terdapat pada NSPM-5 diawali pada penerbangan *direct* dari AS ke Kuba, rute kapal pesiar, dan usaha hotel.[103] Presiden Donald Trump juga menyerukan untuk terus mendukung embargo ekonomi Kuba yang telah dijelaskan dalam *Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996* pasal 4 (7), termasuk menentang langkah-langkah yang

[102] Janet Freer, "Streghtening the Policy of the United States Toward Cuba", *Office of Directives Management, Bureau of Administration: Department of State*, Vol.82, No.202, (2017): hal.48876
[103] *Ibid*., https://www.cfr.org/timeline/us-cuba-relations

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuarakan untuk mengakhiri embargo di PBB dan forum internasional lainnya.[104] Disisi lain Presiden juga berusaha untuk mendukung orang Kuba melalui perluasan layanan internet, kebebasan pers, serta perjalanan yang resmi atau tidak ilegal.

2. Implementasi Kebijakan NSPM-5

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II mengenai kerangka teoritik politik luar negeri, bahwa tahap selanjutnya dalam menganalisis politik luar negeri menurut Marijke Breuning yaitu *Behavior*. Dalam arti singkat *behavior* merupakan suatu tindakan atau aksi dari adanya keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor utama suatu negara. Dalam bagian ini, peneliti menganalisis apa saja tindakan atau implementasi yang dilakukan oleh aktor utama yaitu Presiden Donald Trump selaku Kepala Negara AS terhadap keputusan yang telah dibuat untuk Kuba.

Sejak NSPM-5 dikeluarkan, Presiden Donald John Trump beserta para jajarannya segera melakukan tindakan sebagai implementasi dari beberapa keputusan yang telah diambil. Keputusan yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump tidak serta merta dilakukannya oleh dia sendiri, melainkan dipengaruhi juga oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta institusi lainnya yang ruang lingkupnya lebih spesifik dalam setiap keputusan yang diambil. Presiden memiliki kekuasaan untuk menandatangani undang-undang atau untuk memveto kebijakan yang dibuat oleh Kongres. Lembaga legislatif AS yaitu Kongres menganut sistem 2 kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat

[104] *Ibid*., https://www.federalregister.gov/d/2017-22928/p-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(DPR). Lembaga cabang eksekutif bertugas untuk mengeluarkan peraturan, tetapi hanya di bawah wewenang hukum yang diberlakukan oleh Kongres, Presiden dapat memveto kebijakan, akan tetapi Kongres juga dapat mengesampingkan veto dengan dua pertiga suara Senat dan DPR. [105] Pembuatan kebijakan luar negeri turut dipengaruhi oleh Departemen yang ada pada negara tersebut, diantaranya yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Dewan Keamanan Nasional, Mahkamah Agung, serta Badan Intelijen Pusat. Dan yang terakhir yaitu tentunya suara publik juga dapat mempengaruhi kebijakan atau undang-undang yang akan disahkan.

Tindakan yang dilakukan oleh kabinet pemerintah AS berupa adanya amandemen baru terhadap *Cuban Assets Control Regulations* (CACR) serta *Export Administration Regulations* (EAR). Masing-masing dari adanya amandemen tersebut untuk menerapkan perubahan pada program sanksi Kuba yang telah diumumkan oleh Presiden pada bulan Juni yang tertera dalam memorandum.

Sesuai dengan NSPM-5, OFAC mewajibkan (1) semua perjalanan pendidikan, *people-to-people*, non akademik dilakukan di bawah naungan organisasi yang tunduk pada yurisdiksi AS serta yang mensponsori pertukaran tersebut untuk mempromosikan kontak *people-to-people*, serta (2) pelancong tersebut didampingi oleh seseorang yang tunduk pada yurisdiksi AS yang

[105] The Legislative Branch, diakses pada 20 Februari 2021, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-legislative-branch/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perwakilan dari suatu organisasi.[106] Perjalanan ke Kuba untuk tujuan wisata tetaplah dilarang. Siapa pun yang menginjakkan kaki di AS, terlepas dari kewarganegaran, maka mereka harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Presiden Donald John Trump beserta jajarannya. Peraturan federal AS telah membatasi perjalanan ke Kuba hanya untuk pelancong yang berlisensi yang terlibat dalam kegiatan tertentu. Sebelum seseorang atau calon pelancong mengajukan lisensi tertentu, berikut terdapat 12 kategori lisensi umum yang terkait untuk perjalan ke Kuba:[107]

1. Kunjungan keluarga
2. Bisnis resmi pemerintah AS, pemerintah asing, dan organisasi antar pemerintah tertentu
3. Aktivitas jurnalis
4. Penelitian dan pertemuan yang bersifat profesional
5. Aktivitas pendidikan
6. Aktivitas keagamaan
7. Pertunjukan publik, klinik, lokakarya, ajang atletik dan kompetisi lainnya, serta pameran
8. Mendukung orang-orang Kuba
9. Projek kemanusiaan
10. Kegiatan yayasan swasta atau lembaga penelitian atau pendidikan

[106] U.S. Department of the Treasury, "Treasury, Commerce, and State Implement Changes to the Cuba Sanctions Rules", diakses pada 10 Desember 2020, https://home.treasury.gov/systen/files/126/cuba_fact_sheet_11082017.pdf

[107] U.S. Department of the Treasury, "Travel to Cuba: Cuba Assets Control Regulations (31 CFR Part 515)", diakses pada10 Desember 2020, https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/ofac-license-application-page

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Ekspor, impor, transmisi suatu informasi atau bahan informasi
12. Transaksi ekspor tertentu yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan otoritas peraturan dan pedoman Departemen Perdagangan yang ada hubungannya dengan Kuba atau yang terlibat dalam perusahaan asing milik atau yang dikendalikan oleh AS.

Namun, pada 4 Juni 2019 OFAC mengubah aturan yang ada dalam CACR agar lebih mengimplementasikan kebijakan luar negeri Presiden Donald John Trump terhadap Kuba.[108] Dalam amandemen tersebut telah diumumkan juga bahwa perjalanan non-keluarga ke Kuba akan dibatasi.

> "*These actions will help to keep U.S. dollars out of the hands of Cuban military, intelligence, and security service*"[109]

Adanya tujuan perubahan tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan AS yaitu Steven Mnuchin, guna menjaga perekonomian AS atau dolar AS dari tangan militer, intelijen, dan layanan keamanan Kuba. Departemen Keuangan juga membatasi akses rezim Kuba untuk mengakses sistem keuangan AS dengan menghilangkan otorisasi transaksi keuangan yang disebut dengan "*U-Turn*".[110] Kedepannya orang-orang AS juga tidak lagi dapat mengirim uang ke keluarga atau kerabat di Kuba, serta tidak lagi diizinkan

---

[108] U.S. Department of the Treasury, "Treasury and Commerce Implement Changes to Cuba Sanctions Rules", diakses pada 15 Desember 2020, https://home.treasury.gov/system/files/126/cubafact_sheet_20190604.pdf diakses pada 15 Desember 2020

[109] *Ibid.*, https://home.treasury.gov/system/files/126/cubafact_sheet_20190604.pdf

[110] U.S. Embassy in Cuba, "United States Restricts Remittances and "U-Turn" Transactions to Cuba", diakses pada 15 Desember 2020, https://cu.usembassy.gov/united-states-restricts-remittances-and-u-turn-transactions-to-cuba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengirim uang donatif terlepas dari hubungan keluarga di Kuba. Dalam hal tersebut, lembaga perbankan yang tunduk pada yurisdiksi AS berwenang untuk menolak serta tidak lagi memproses transaksi tersebut.

Sesuai dengan kebijakan pada NSPM-5, pemerintah AS membuat *Cuba Internet Task Force* (CITF) guna mendukung perluasan akses telekomunikasi dan internet bagi masyarakat Kuba. CITF juga akan memberikan pemerintah AS saran dan informasi dari para ahli dan pemangku kepentingan mengenai tantangan teknologi serta peluang untuk mengakses internet di Kuba. Satgas akan memiliki anggota tidak lebih dari 12 orang. Dari jumlah tersebut, 10 anggota diharuskan berasal dari departemen dan lembaga terkait pemerintah AS, yaitu Departemen Luar Negeri, Kantor Penyiaran Kuba, Komisi Komunikasi Federal, Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional yang berasal dari Departemen Perdagangan, serta Badan Pembangunan Internasional AS.[111]

Pembentukan serta Rapat perdana CITF dilaksanakan pada 7 Februari 2018 di Departemen Luar negeri Gedung Harry S. Trauman dengan hasil pembahasan bahwa akan dibentuk dua sub-komite, (1) untuk mengeksplorasi peran media dan aliran informasi yang bebas dan tidak diatur di Kuba, (2) untuk menjelajahi akses internet di Kuba.[112] Pada pertemuan kedua yang diselenggarakan di Departemen Luar negeri Gedung Harry S. Trauman pada 6

[111] U.S. Department of State, "Membership Balance Plan, Cuba Internet Task Force", diakses pada 15 Desember 2020, https://www.state.gov/membership-balance-plan-cuba-internet-task-force

[112] U.S. Department of State, "Cuba Internet Task Force-February 7, 2018 Meeting Documents", diakses pada 15 Desember 2020, https://www.state.gov/cuba-internet-task-force-february-7-2018-meeting-documents-2/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember 2018 akan mempresentasikan hasil pengamatan selama di Kuba.[113] Hasil pengamatan tersebut digunakan untuk mengembangkan akses internet serta telekomunikasi di Kuba.

Keputusan final dari adanya beberapa pertemuan diatas akan diselenggarakan saat rapat terakhir yang diselenggarakan pada 16 Juni 2019.[114] CITF menganalisis bahwa terdapat empat hambatan utama dalam mengakses internet ke Kuba, diantaranya yaitu (1) infrastruktur yang terbatas, harga sangat tinggi, kecepatan akses rendah, serta akses yang diatur oleh pemerintah, (2) pemerintah Kuba sangat otoriter, (3) literasi digital, (4) tantangan masuknya pasar AS.[115]

Meskipun Kuba mengalami sanksi ekonomi tersebut, namun mereka tetap mendapatkan imbalan dari AS. Hal tersebut dikarenakan AS yang merupakan negara terkenal akan *soft power* yang baik, contohnya dalam tingkat industrialisasi serta kemampuan ekonomi yang bagus, maka mereka mengekspor beberapa hasil kemampuannya ke Kuba. AS juga merupakan negara yang memproduksi serta penyedia makanan dan agrikultul terbesar untuk Kuba, pemasok barang-barang kemanusiaan, termasuk obat-obatan dan produk medis, serta pengiriman uang yang dilakukan oleh AS dengan total senilai $3,5 miliar pada tahun 2017.[116]

---

[113] U.S. Department of State, "Cuba Internet Task Force-December 6, 2018 Meeting Documents", diakses pada 15 Desember 2020, https://www.state.gov/cuba-internet-task-force-december-6-2018-meeting-documents/

[114] U.S. Department of State, "Cuba Internet Task Force: Final Report", diakses pada 15 Desember 2020, https://www.state.gov/cuba-internet-task-force-final-report

[115] *Ibid.,*

[116] U.S. Department of State, "*U.S. Relations with Cuba: Bilateral Relations Fact Sheet*", diakses pada 18 Februari 2021, https://www.state.gov/u-s-relations-with-cuba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dampak Penerapan Kebijakan NSPM-5 terhadap Kuba

Setelah melalui proses panjang mulai dari pengambilan keputusan oleh Presiden Donald John Trump sampai dengan implementasi dari keputusan yang telah dibuat berupa tindakan-tindakan, akan menuai hasil pada akhirnya nanti.

Dampak negatif yang paling terlihat berupa semakin renggangnya hubungan AS dengan Kuba. Dikarenakan keputusan serta tindakan yang dibuat oleh Presiden Donald John Trump telah merugikan Kuba. Terdapat beberapa data statistik yang menunjukkan dampak kerugian yang dialami oleh Kuba yang berasal dari AS.

Renggangnya hubungan AS dengan Kuba berdampak pada kunjungan wisatawan atau pelancong AS ke Kuba. Data terakhir yang tercatat menunjukkan penurunan drastis kedatangan wisatawan atau pelancong AS ke Kuba. Pada bulan Juni 2019 sudah menunjukkan adanya penurunan sebesar 20%, sedangkan Juli 2019 data menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan AS ke Kuba telah menurun sebesar 23,6%.[117]

Meskipun sanksi ekonomi AS terhadap Kuba tetap diberlakukan dengan ketat, namun AS tetap mengekspor produk makanan dan pertanian ke Kuba senilai $220,5 juta pada tahun 2018.[118] AS juga mengeskpor barang-barang kebutuhan medis untuk Kuba. Disisi lain, nilai impor Kuba terhadap

[117] Sarah Marsh, "Tourism to Cuba plunges after Trump's tightening of travel ban: data", pada 4 Januari 2021, https://www.reuters.com/article/us-cuba-tourism-idUSKCN1VB22C diakses pada 4 Januari 2021

[118] *Ibid*., diakses pada 4 Januari 2021, https://www.state.gov/u-s-relations-with-cuba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AS sangatlah kecil. Hal ini sesuai dengan kebijakan "*U-Turn*" yang dijalankan oleh AS.

Perdagangan Barang Amerika Serikat dengan Kuba

Nilai angka dalam juta dolar AS

Tahun	Total Ekspor	Total Impor
2017	291,3	0
2018	271,0	1,3
2019	286,5	2,5

Tabel 4.1 Trade in Goods with Cuba (Sumber: United States Census Bureau, https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2390.html#2019"

Seperti terlihat pada data di atas, jumlah ekspor dari AS ke Kuba menunjukkan nilai yang besar dibandingkan dengan nilai impor dari Kuba ke AS. Hal ini mengindikasikan bahwa AS tidak mau negaranya menerima barang dari Kuba, karena AS tidak mau membantu perekonomian Kuba. Sedangkan AS tetap melakukan ekspor, karena ekspor akan menguntungkan negara AS. Di sisi lain, AS ingin menunjukkan bahwa dia masih mempunyai rasa kemanusiaan terhadap warga Kuba guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia serta melindungi citra negaranya.

Berikutnya, dampak yang dirasakan Kuba dari sisi akses internet dan telekomunikasi. Warga Kuba dapat merasakan kepemilikan barang-barang elektronik yang berhubungan dengan internet dan telekomunikasi. Seperti kepemilikan telepon seluler, televisi, laptop, dan radio yang merupakan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AS untuk mengeskpor barang-barang tersebut ke Kuba.[119] Banyak pula perusahaan IT dari AS yang menawarkan kerjasama kepada pemerintah Kuba dalam pengembangan akses internet. Meskipun sudah banyak perusahaan IT yang masuk dan menandatangani kerjasama, namun untuk kebebasan akses berkomunikasi, mendapatkan dan memberi informasi melalui sarana tersebut, warga Kuba masih kesulitan. Kuba telah mempunyai akses 3G untuk jaringan internet dan ratusan titik wifi yang dibuat oleh pemerintah Kuba, namun masuknya informasi dari luar tetap dibatasi oleh pemerintah Kuba sendiri.[120] Pemerintah AS juga memberikan batasan untuk membagi informasi apapun melalui jaringan internet, televisi, dan radio kepada warga Kuba. hal inilah yang menyebabkan warga Kuba masih kesulitan mendapatkan kebebasan infromasi dari luar Kuba dan memberi informasi dari dalam Kuba.

Inilah yang menyebabkan Kuba masih tertinggal serta tertutup dari dunia internasional. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi globalisasi dunia saat ini, dimana semua orang di belahan dunia saling terhubungan melalui berbagai sarana telekomunikasi yang dipenuhi dengan jaringan internet.

Melihat adanya beberapa keterlambatan yang dialami oleh Kuba, membuat negara-negara lain atau aktor eksternal menjalin hubungan bilateral ataupun kerjasama dengan Kuba. Dengan bergabungnya Kuba dengan beberapa organisasi internasional, juga dapat membantu perkembangan Kuba di sistem internasional. Beberapa organisasi internasional yang diikuti oleh

[119] Engage Cuba, "Cuba has a potential to become the digital innovation hub of the Carribean", diakses pada 4 Januari 2021, https://www.engagecuba.org/technology-telecommunications
[120] *Ibid*.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuba yaitu PBB, WHO, UNESCO, ILO, UNCTAD, G77, G33, CELAC (*Community of Latin American and Caribbean States*), ALBA atau ALBA-TCP (*Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America*).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya NSPM-5 dalam poliitk luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Faktor pertama yaitu untuk menguatkan kebijakan AS terhadap Kuba guna melindungi keamanan dan kepentingan AS, adanya faktor sejarah AS dan Kuba pada masa lalu yang tidak harmonis. Berawal pada era perang dingin, yang mana pada era tersebut terjadinya Krisis Rudal Kuba yang membuat AS merasa terancam dengan adanya lemparan-lemparan rudal Kuba yang pada waktu itu dibantu oleh Uni Soviet. Sehingga pada saat Presiden Donald Trump memimpin AS masih terdapat rasa luka, sehingga ia memberikan peringatan atas kejadian yang pernah dialami AS tersebut berupa diberlakukannya pembatasan kembali serta aturan baru terhadap Kuba dalam hal wisata, ekonomi, serta ICT.

Faktor perbedaan ideologi juga merupakan salah satu faktor terjadinya NSPM-5 pada politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Donald Trump yang sebelumnya berstatus sebagai pengusaha serta selebriti berhasil mengejutkan publik lantaran ia berhasil memenangkan pemilihan Presiden ke-45 AS pada tahun 2016, dan dilantik pada Januari 2017. Ideologi AS yang merupakan liberal-demokratis sudah sangat terlihat bahwa bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh pemerinatahan Kuba yaitu sosialis-komunis. Sehingga keputusan Presiden Donald Trump untuk membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan luar negerinya dalam NSPM-5 lantaran ia tidak ingin bersaing serta terlalu ikut campur dengan negara yang berhaluan ideologi sosialis-komunis. Selain Kuba terdapat pula negara sosialis-komunis yang hubungannya sempat tidak harmonis dengan AS, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Laos.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti menggunakan analisis politik luar negeri menurut Marijke Breuning, dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor terbentuknya *National Security Presidential Memorandum-5* (NSPM-5) dalam politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump disebabkan karena adanya perbedaan ideologi antara AS dengan Kuba, serta melihat kembali sejarah pada masa lalu sehingga membuat AS memberikan sanksi atau embargo ekonomi ke Kuba. Tidak hanya itu, alasan terjadinya NSPM-5 pada politik luar negeri AS terhadap Kuba juga disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kuba, sehingga Presiden Donald Trump berkeinginan untuk memberikan warga Kuba untuk bebas dalam bersuara, mengakses internet, serta teknologi. Selain alasan tersebut, pertimbangan terjadinya NSPM-5 juga disebabkan karena untuk penguatan kembali sanksi kebijakan terhadap Kuba,

Latar belakang kehidupan Presiden Donald John Trump juga mempengaruhi alasan terjadinya NSPM-5 pada politik luar negeri AS. Sehingga muncul beberapa keputusan atau kebijakan yang baru dan segera diimplementasikan guna keamanan serta kepentingan negaranya. Dengan adanya kebijakan serta tindakan yang telah dilakukan tersebut, muncullah hasil akhir yang berdampak pada Kuba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Peneliti paham bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi yang berjudul "Studi Analisis Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kuba pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump" masih terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, baik secara analisis maupun penulisan. Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada pihak yang mungkin akan membahas isu yang sama dengan peneliti, yaitu (1) menganalisis bagaimana politik luar negeri AS terhadap negara Kepulauan Karibia yang lainnya, (2) menganalisis bagaimana respon warga Kuba dan AS terhadap terjadinya politik luar negeri yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump, (3) menganalisis mengapa Kuba terlambat akan ICTnya sehingga beberapa wisatawan mancanegara yang pergi kesana kesusahan untuk mencari akses internet. Penulis beranggapan bahwa ketiga saran tersebut mampu melengkapi analisi penelitian ini, yang mana dalam analisis peneliti masih terdapat kekurangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction.* Palgrave Macmillan: NewYork

Creswell, W. John. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Sage Publications: Los Angeles, Edisi Ketiga

Creswell, W. John. 1998. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Hudson, A. Rex. 2002. *Cuba a Country Study*. Federal Research Divison: Library of Congress, 4th edition

Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edinburgh: Pearson Education Limited

Rosenblum, Lilah. *A Time for Change: Rethingking US-Cuba Policy*. 2002. Washington Office on Latin America (WOLA)

Setiawan, Asep, dan Endang Sulastri. 2017. *Studi Politik Luar Negeri*. UMJ Press

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpratif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.* Alfabeta: Bandung

Jurnal atau Artikel

Łaciński, Piotr. 2015. *Normalization of US-Cuban Relations: Obama Doctrine and International Security in The Western Hemisphere*. Poland

Africa. 2005. *The Impact of Mobile Phones*. The Vodaphone policy, Paper Series, No 2

Anon. 2017. *US. Cuba Relationns Update: Six Key Points*. Washington: Albright Stonebridge Group

Augina, Amild. 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. Universitas Jambi: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol.12 Edisi 3

Atthariqa, Andry. 2017. *DAMPAK REFORMASI EKONOMI DAN POLITIK KUBA TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2008-2016.* Jurnal: Universitas Riau, JOM FISIP Volume 4 No.1

Bimbaum, Ben, Sara Elsayed, Bonnie Krenz, Eduardo Massieu Paredes, etc., 2016. *United States-Cuba Relations: Policy Recommendations to Advance Normalization.* Princeton University: Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Workshop Report

Commission, Trade International. 2001. *The Economy Impact of U.S. Sanctions with Respect to Cuba*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Espino, Dolores Maria. 2008. *International Tourism in Cuba: An Update*. Cuba in Transition, ASCE

Leogrande, M William. 2015. *Normalizing US-Cuba Relations: Escaping the Shackles of the Past*. The Royal Institute of International Affairs: John Willey & Sons, UK

Leogrande, M William. 2016. *No Time to Lose: Navigating the Shoals of the New U.S.-Cuba Relationship*. A Joint Project of the Cuba Program: Institute of Latin American Studies, Columbia University

Mousavi, Mohammad Ali, dan Elaleh Nourigholamizadeh. 2018. *A Qualitative Content Analysis of US Foreign Policy towards Cuba during Barack Obama's Administration: Hegemony or Leadership*? Journal of World Sociopolitical Studies, Department of American Studies, University of Tehran, Vol.2 No.3 pp 445-481

Piccone, J Theodore, Christopher Sabatini, Carlos Saladrigas. 2010. *Bridging cuba's Communication Divide: How U.S. Policy Can Help.* Brookings: Research report, 1.

Rachman, Muhammad Arraf Rezkia. 2018. *ANALISIS KEBIJAKAN TRAVEL BAN OLEH DONALD TRUMP*. Jurnal: Universitas Padjajaran, Vol.04, No.02

Rodríguez, Raúl dan Harry Targ. 2015. *US Foreign Policy Towards Cuba: Historical roots, Traditional Explanations and Alternative*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perspective. International Journal of Cuban Studies, Vol.7 No.1, pp 16-37

Ruano, Lorena. 2017 *Cuba and Trump: the power of symbolys*. European Union: Institute for Security Studies (EUISS)

Salamah, Nur. 2020. *PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KUBA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP TAHUN 2017 2019*. Jurnal: Universitas Riau, JOM FISIP Vol.7: Edisi I Januari-Juni 2020

Taufik, Esmeralda Ranisa. 2019. *Kerjasama Anti-Perdagangan Narkoba Amerika Serikat dan Kuba Sebagai Isu Keamanan Nasional pada Era Pemerintahan Presiden Donald J. Trump.* Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 4, hal.718-726

Zawatsky, Ethan dan Ashley Gemma. 2015. *Diplomatic Normalization Between the Us and Cuba in Light of Recent Changes in US Foreign Policy More Generally*. University of Rhode Island

Skripsi

Fadel, Iqbal. 2018. *ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT MEMBUKA KEMBALI KEDUTAAN BESAR DI KUBA PADA TAHUN 2015*. Skripsi: Universitas Brawijaya

Januarko, Arief Bimo. 2018. *Kerjasama Bilateral Kuba-AS Pasca Normalisasi Hubungan Kedua Negara Periode (2014-2017)*. Skripsi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta

Nurjannah, Winda. 2018. *Analisis Pemblokadean Kembali Amerika Serikat Terhadap Kuba tahun 2017*. Skripsi: Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Sakka, Zavira Umar Zarah. 2019. *IMPLEMENTASI NORMALISASI HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN KUBA TAHUN 2014-2017*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia

Situs Internet

Affairs, of Bureau Western Hemisphere. 2019. *Cuba Internet Task Force: Final Report*. U.S. Department of State: Report, https://www.state.gov/cuba-internet-task-force-final-report/ diakses pada 12 Agustus 2020

Anon. 2020. *Cuba: U.S. Policy Overview*. Congressional Research Service: https://crsreports.congress.gov diakes pada 10 Oktober 2020

Bixby Scott, Claire Phipps, Tom McGarthy, etc., "*Donald Trump at the White House: Obama reports 'excellent conversation'-as it happened*". The Guardian, https://www.theguardian.com/us -news/live/2016/nov/10/donald-trump-barack-obama-white-house-us-election-live-updates diakses pada 20 Februari 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Breitman, Kendall. 2014. Where the 2016 Crowd Stans on Cuba. https://www.politico.com/story/2014/12/cuba-top2016-contenders-113642 diakses pada 2 Desember 2020

Cambridge Dictionary. 2020. *Meaning of Rollback in English*, Cambridge UniversityPress, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/roll-back diakes pada tanggal 10 November 2020

Cfr. *U.S. Cuba Relations 1959-2021*. https://www.cfr.org/timeline-us-cuba relations diakses pada 2 Desember 2020

Crahan, E. Margaret. 2018. *The Role of Ideology in the Moulding of US Foreign Policy Towards Cuba*. International Journal of Cuban Studies, Vol.10, No.2, hal.157-174, https://www.jstor.org/stable/10.13169/intejcubastud.10.2.0157 diakses pada 11 Maret 2021

Dharma, Silviana. 2017. *Susunan Acara Pelantikan Donald Trump dan Mike Pence*. https://www.new.okezone.com/read/2017/01/16/18/1592581/susunan -acara-pelantikan-donald-trump-dan-mike-pence diakses pada 12 Agustus 2020

Ding. 2018. *Mobile data coming to Cuban Phone Users in 2018*. https://www.ding.com/countries/carribean/cuba/recharge -cubacel/blog/mobile-data-coming-to-cuban-phone-users-in-2018 diakses pada 12 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Editor Biography. 2014. *Donald Trump Biography.* A&E Television Network, https://www.biography.com/us-president/donald-trump diakes pada 15 November 2020

Editors, History. *United States severs diplomatic relations with Cuba.* https://www.history.com/this-day-in-history-united-states-severs -diplomatic-relations-with-cuba diakses pada 12 Agustus 2020

Gonzáles, Yoan Karell Acosta. 2017. *The US-Cuba Policy Shift as Viewed by The New York Times: A Critical Analysis from the Island*. International Journal of Cuban Studies, Vol.9, No.2, hal.180-195, https://www.jstor.org/stable/10.13169/intejcubastud.9.2.0180 diakses pada 11 Maret 2021

House, the White. 2015. *Remarks by President Obama and President Raúl Castro Cuba Before Meeting*. The White House: Office of the Press Secretary, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press office/2015/04/11/remarks-president-obama-and-president-raul -castro-cuba-meeting diakses pada 30 November 2020

Jones, steve. *US and Cuba Have History of Complex Relations.* https://www.thoughtco.com/us-and-cuba-have-history-of-complex -relations-3310195 diakses pada 12 Agustus 2020

Kerry, John. 2015. Press Availability with Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez. U.S. Department of States: Washington, DC, https://2009 -2017.state.gov/secretary/remarks/2015/07/245094.html diakses pada 30 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kirby, Jen. 2019. *Trump tightens Cuba travel rules*. https://www.vox.com/2019/6/4/18652342/cuba-trump-restrictions -travel-cruises diakses pada 12 Agustus 2020

Kombluh, Peter. *Why Is Trump Assaulting American's Freedom to Travel to Cuba?* https://www.thenation.com/article/archive/cuba-trump-travel -restrictions/ diakses pada 12 Agustus 2020

Leogrande, M William. 2017. *Reversing the Irreversible: President Donald J. Trump's Cuba Policy*. Institut des Amériques, 1, https://journals.openedition.org/ideas/2258 diakses pada 30 November 2020

Merica, Dan. 2017. *Trump unveils new restrictions on travel, business with Cuba*. CNN Politics, https://edition.cnn.com/2017/06/16/politics/trump-cuba-policy /index.html diakses pada 4 Februari 2021

Mindock, Clark. 2017. *Donald Trump announces new Cuba restrictions: we will not be silenced in the face of communist oppression*. The Independent, New York, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us -politics/trump-cuba-travel-restrictions-what-does-it-mean-obama -rollback-expert-explained-a7794226 diakses pada 4 Februari 2021

OFAC. 2008. Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.us - treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/cuba/cuba.shtml diakes pada 10 Oktober 2020

Oliva, Carlos and Gary Prevost. 2019. *The Trump Administration in Latin America: Continuity and Change*. International Journalf of Cuban Studies, Vol.11, No.1, hal.13-23, https://www.jstor.org/stable/10.13169/intejcubastud.11.1.0013 diakses pada 11 Maret 2021

Prevost, Gary. 2007. *Fidel Castro and Cuban Revolution*. Headwater: The Faculty Journal of the College of Saint Benedict and Saint John's University, Vol. 24 https://digitalcommons.csbsju.edu/headwaters/vol24/issl//4 diakes pada 2 Desember 2020

Stands4 network. "Definitions for Rollback". https://www.definitions.net/definition/rollback diakes pada tanggal 10 November 2020

Stephen and Johnson. 2017. *Fidel Castro and the Consolidation of the Cuban Revolution 1959-1963*. Department of History and International Studies: Ekiti State University, Nigeria www.worldscientificnews.com/wpcontent/uploads/2017/08/WSN -87-2017-60-76-2.pdf diakses pada 2 Desember 2020

Sullivan, P Mark. 2020. Cuba: U.S. Policy Overview. Congressional Research Service, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10045 diakses pada 12 Agusus 2020

The Treasury, of U.S. Department. 2000. *Trade Sanctions Reform andExport Enhancement Act of 2000*. Hal.1516 https://home.treasury.gov/system/files/126/tsra.pdf diakses pada 25 November 2020

Thewhitehouse. *Fact Sheet on Cuba Policy*. https://www.whitehouse.gov/articles/fact-sheet-cuba-policy diakes pada tanggal 10 November 2020

Treasury, of U.S. Department. 2003. *2003 Amendments to the Cuban Assets Control Regulations*. Office of Foreign Assets Control, hal.14141 https://home.treasury.gov/system/files/126/fr68_14141.pdf diakses pada 25 November 2020

Treasury, of U.S. Department. 2009. *Cuban Assets Control Regulations*. Office of Foreign Assets Control, Treasury https://home.treasury.gov/system/files/126/CACR_Amendments_09032009.pdf diakses pada 25 November 2020

Treasury, of U.S. Department. 2011. Cuban Assets Control Regulations. Office of Foreign Assets Control, Treasury, https://home.treasury.gov/system/files/126/fr76_5072.pdf diakses pada 25 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Treasury, of U.S. Department. 2012. *Cuban Assets Control Regulations*. Office of Foreign Assets Control, Treasury, https://home.treasury.gov/system/files/126/fr77_71530.pdf diakses pada 25 November 2020

Woolley, T, dan Gerhard Peters. *John F. Kennedy, White House Statement Concerning the Embargo on Trade with Cuba*. The American Presidency Project, https://www.presidency.ucsb.edu/node/236435 diakses pada 20 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id